



Katalog BPS : 1415.12.17

IPM

ANALISIS SITUASI PEMBANGUNAN MANUSIA

KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2008

<http://samosirkab.bps.go.id>

Kerjasama dengan :
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SAMOSIR



IPM

Katalog BPS : 1415.12.17
Nomor Publikasi : 1217.09.04

ANALISIS SITUASI PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN SAMOSIR 2008

Kerjasama :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Samosir
Dengan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir



Badan Pusat Statistik Kabupaten Samosir
/BPS - Statistics of Samosir Regency

ANALISIS SITUASI PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN SAMOSIR 2008

Katalog BPS : 1415.12.17
No. Publikasi : 1217.09.04.

Ukuran Buku : 15 cm x 21 cm
Jumlah halaman : x + 82 halaman

Naskah:

Seksi Neraca Wilayah Dan Analisis Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Samosir

Gambar Kulit :

Seksi Neraca Wilayah Dan Analisis Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Samosir

Diterbitkan Oleh :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Samosir

Bekerjasama dengan :

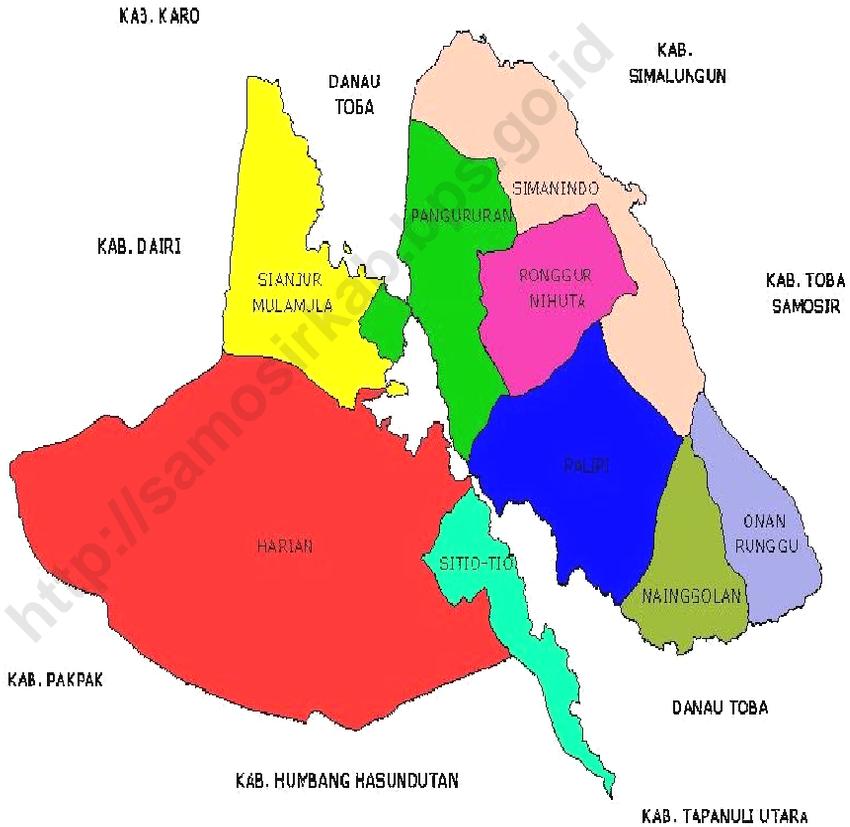
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir

Sumber Dana:

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Samosir T.A.
2009

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

Peta Kabupaten Samosir



SAMBUTAN

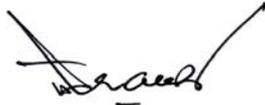
Saya menyambut gembira atas penerbitan Publikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Samosir ini yang merupakan hasil kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Samosir dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Samosir.

Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu indeks yang menggambarkan kualitas manusia dalam suatu daerah ditinjau dari tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan standar hidup layak (pendapatan masyarakat).

Publikasi ini diharapkan dapat menjadi salah satu indikator dalam pembangunan khususnya sebagai bahan perencanaan dan evaluasi pembangunan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Samosir.

Semoga Publikasi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Samosir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Pangururan, September 2009
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Samosir
Kepala,



Ir. Hatorangan Simarmata
NIP. 730004586

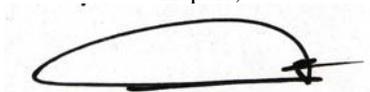
KATA PENGANTAR

Publikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Samosir tahun 2008 menyajikan analisis situasi pembangunan manusia ditinjau dari aspek pendidikan (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah), kesehatan (angka harapan hidup), daya beli masyarakat, status pembangunan manusia, peringkat nasional IPM Kabupaten Samosir, dan hubungan antara IPM dengan perekonomian Kabupaten Samosir.

Publikasi ini tidak hanya menggambarkan kondisi tahun 2008 saja, namun juga dibandingkan dengan kondisi tahun 2005 sehingga dapat melihat perkembangan pembangunan manusia selama periode 2005-2008. Selain itu publikasi ini juga membandingkan hasil pembangunan manusia dengan kabupaten/kota lain di Propinsi Sumatera Utara.

Diharapkan dengan terbitnya publikasi ini maka kebutuhan ketersediaan data khususnya data pembangunan manusia dapat dipenuhi dengan baik. Kepada semua pihak yang telah membantu kami untuk terwujudnya publikasi ini, baik langsung maupun tidak langsung diucapkan terimakasih

Pangururan, September 2009
Badan Pusat Statistik
Kabupaten Samosir
Kepala,



Drs. Anggiat Tulus Sibagariang
NIP. 19680328 199402 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
PETA KABUPATEN SAMOSIR	iii
KATA SAMBUTAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN SAMOSIR	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Maksud dan Tujuan	6
1.3. Sistematika Penyajian.....	7
BAB II URAIAN TEORITIS	10
2.1. Konsep Pembangunan Manusia.....	10
2.2. Konsep Pembangunan Manusia Seutuhnya	16
2.3. IPM : Pengukuran Pencapaian Pembangunan	17
2.4. Pemanfaatan IPM dalam Perencanaan Pembangunan	19
2.5. Kedudukan IPM dalam Pembangunan Daerah	21
2.6. Sistem Informasi Pembangunan Manusia.....	23
2.7. Sumber Data Pemantauan Pembangunan Manusia Dan Kerangka Kerjasama	24
BAB III METODOLOGI.....	29
3.1. Sumber Data	29
3.2. Metodologi dan Tahapan Penghitungan IPM	30
3.2.1 Komponen-Komponen IPM.....	30
3.2.2. Tahapan Penghitungan IPM.....	32
3.2.3. Penentuan Status IPM	33

3.3. Konsep dan Defenisi.....	36
3.3.1 Rumahtangga & Anggota Rumahtangga	36
3.3.2 Pendidikan.....	37
3.3.3 Perumahan dan Lingkungan.....	37
3.3.4 Konsumsi/Pengeluaran.....	38
BAB IV KONDISI UMUM KABUPATEN SAMOSIR	41
4.1. Kependudukan	41
4.1.1. Jumlah dan Persebaran Penduduk	42
4.1.2. Komposisi Umur	42
4.2. Pendidikan	44
4.2.1. Partisipasi sekolah.....	45
4.2.2. Tingkat Pendidikan	46
4.3. Perumahan	47
4.3.1. Kondisi Fisik Bangunan.....	48
4.3.2. Fasilitas Perumahan	49
4.4. Perekonomian	50
BAB V INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	53
5.1. Komponen Indeks Pembangunan Manusia.....	53
5.1.1. Indeks Pengetahuan.....	53
5.1.2. Indeks Kelangsungan Hidup	56
5.1.3. Indeks Daya Beli.....	58
5.2. Status Pembangunan Manusia	60
5.3. Reduksi Shortfall	64
LAMPIRAN	66

DAFTAR TABEL / List of Table

		Halaman/ Pages
<u>Tabel : Table</u>	1.1. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan <i>Total Area, Population, and Population Density By Sub Regency</i> Tahun 2008	67
<u>Tabel : Table</u>	1.2. Jumlah Penduduk, Jenis Kelamin, dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan <i>Population, Sex, and Sex Ratio By Sub Regency</i> Tahun 2008	68
<u>Tabel : Table</u>	1.3. Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur, dan Jenis Kelamin <i>Percentage of Population By Age Group, and Sex</i> Tahun 2008	69
<u>Tabel : Table</u>	1.4. Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas, Menurut Status Perkawinan, dan Jenis Kelamin <i>Percentage of Population Aged 10 years and Over By Marital Status, and Sex</i> Tahun 2008	70
<u>Tabel : Table</u>	1.5. Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, dan Jenis Kelamin <i>Percentage of Population Aged 10 Years and Over by Educational Attainment and Sex</i> Tahun 2008	71
<u>Tabel : Table</u>	1.6. Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Tempat Tinggal (m ²) <i>Percentage of Household by Floor Area of Dwelling Unit (m²)</i> Tahun 2008	62
<u>Tabel : Table</u>	1.7. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Terluas dari Tempat Tinggal <i>Percentage of Household by Primary Floor Material of the Dwelling Unit</i> Tahun 2008	73
<u>Tabel : Table</u>	1.8. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Utama Air Minum <i>Percentage of Household by Main Source of Drinking Water</i> Tahun 2008	74
<u>Tabel : Table</u>	1.9. Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Pembuangan Air Besar <i>Percentage of Household by Sanitation Facility</i> Tahun 2008	75
<u>Tabel : Table</u>	2.1. Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara <i>Life Expectancy and Infant Mortality Rate (IMR) by Regency/City in Sumatera Utara Province 2005 - 2008</i>	76

Index Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Samosir Tahun 2008

<u>Tabel :</u> Table	2.2. Angka Melek Huruf Menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara <i>Literacy Rate By Regency/City in Sumatera Utara Province</i> Tahun 2005- 2008	77
<u>Tabel :</u> Table	2.3. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Kabupaten/Kota <i>Mean Years of Schooling By Regency/City</i> Tahun 2005 – 2008	78
<u>Tabel :</u> Table	2.4. Pengeluaran Riil Per Kapita yang Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota <i>The Real Cost Percapita by Regency/City</i> Tahun 2005 - 2008	79
<u>Tabel :</u> Table	2.5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota <i>Human Development Index (HDI) by Regency/City</i> Tahun 2005- 2008	80
<u>Tabel :</u> Table	2.6. Peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara secara Nasional dan Propinsi Sumatera Utara. <i>Nationally and Sumatera Utara Provincially Rate of Human Development Index (HDI) by Regency/City in North Sumatera</i> Tahun 2007- 2008	81
<u>Tabel :</u> Table	2.7. Reduksi Shortfall Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Sumatera Utara secara Nasional dan propinsi Sumatera Utara <i>Nationally and Sumatera Utara Propincially Shortfall Reduction Rate of Human Development Index (HDI)of by Regency/City in Sumatera Utara</i> 2006-2008.....	82

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. Hubungan Antara Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi.....	15
Gambar 2. Status Indeks Pembangunan Manusia.....	35
Gambar 3. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2006 - 2008.....	43
Gambar 4. Angka Partisipasi Sekolah Samosir dan Sumatera utara Tahun 2008.....	45
Gambar 5. Tingkat Pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk usia 10 tahun ke atas Tahun 2008	47
Gambar 6. Presentase Penduduk usia 10 tahun ke atas Menurut Pendidikan yang ditamatkan Tahun 2008	55
Gambar 7. Angka Harapan hidup Kabupaten Samosir dan Sumatera Utara 2005-2008	58
Gambar 8. Tingkat daya beli Penduduk Kabupaten Samosir dan Sumatera Utara Tahun 2005-2008	60
Gambar 9. IPM Kabupaten Samosir dan Sumatera Utara Tahun 2008.....	62

<http://samosirkab.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Maksud dan Tujuan

1.3. Sistematika Penyajian

<http://samodirjab.pps.go.id>

P E N D A H U L U A N

1.1. LATAR BELAKANG

*M*anusia adalah kekayaan bangsa dan sekaligus sebagai modal dasar pembangunan. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati hidup sehat, umur panjang, dan menjalankan kehidupan yang produktif.

Untuk mewujudkan tercapainya ketiga unsur tersebut dilakukan upaya konkrit dan berkesinambungan. Misalnya untuk mencapai umur panjang ataupun Angka Harapan Hidup yang tinggi, harus didukung oleh tingkat kesehatan yang baik, status gizi baik dan semua prasarana lingkungan yang baik. Untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan, manusia harus meningkatkan kualitas pendidikannya, pembangunan pendidikan harus diutamakan dimana angka melek huruf ditingkatkan. Untuk itu rata-rata lama bersekolah harus diatas 12 tahun atau setingkat tamat SLTA. Disamping itu penduduk harus mempunyai kesempatan untuk merealisasikan pengetahuan dan keterampilannya dengan tersedianya lapangan pekerjaan, sehingga dapat direfleksikan dalam kegiatan produktif yang menghasilkan pendapatan bagi manusia. Dengan pendapatan tersebut manusia dapat memenuhi kebutuhannya dengan cara meningkatkan daya beli. Akhirnya dengan ketiga unsur di atas diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidupnya dan mencapai standar hidup layak.

Selain itu secara umum pembangunan manusia dalam pengertian luas mengandung konsep teori pembangunan ekonomi yang konvensional termasuk model pertumbuhan ekonomi, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), pendekatan kesejahteraan, dan pendekatan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Model pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan peningkatan pendapatan dan produksi nasional (GNP). Pembangunan SDM menempatkan manusia terutama sebagai input dari proses produksi (sebagai suatu sarana bukan tujuan). Pendekatan kesejahteraan melihat manusia sebagai pemanfaat (*beneficiaries*) bukan sebagai objek perubahan dasar yang berfokus pada penyediaan barang dan jasa kebutuhan hidup.

Manusia sebagai subjek dan objek pembangunan dalam kehidupannya harus mampu meningkatkan kualitas hidupnya sebagai insan pembangunan. Pembangunan sumber daya manusia secara fisik dan mental mengandung makna peningkatan kapasitas dasar penduduk yang kemudian akan memperbesar kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan. Konsep pembangunan manusia memenuhi dimensi yang sangat luas dengan banyak pilihan, hanya mungkin tercapai jika penduduk tersebut memiliki peluang angka harapan hidup yang tinggi atau umur panjang dan sehat, memiliki pengetahuan dan ketrampilan atau keahlian serta mempunyai peluang atau kesempatan untuk merealisasikan pengetahuan tersebut dalam kegiatan yang produktif, sehingga penduduk memiliki daya beli. Dengan kata lain manusia itu harus berkualitas, serta berproduktivitas tinggi. Sehingga dapat mewujudkan kehidupannya yang mencapai standar hidup layak.

Salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan atau kinerja (*performance*) suatu negara atau wilayah dalam bidang pembangunan manusia adalah dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau ***Human Development Index (HDI)***.

Hubungan pembangunan manusia dengan pertumbuhan ekonomi sangat erat sekali dan merupakan prasyarat tercapainya pembangunan manusia, karena peningkatan pembangunan ekonomi akan mendukung peningkatan produktivitas melalui pengisian kesempatan kerja dengan usaha-usaha produktif sehingga tercipta peningkatan pendapatan sesuai dengan UNDP (1996).

Namun perlu dicatat bahwa konsep pembangunan manusia berbeda dengan pembangunan yang memberikan perhatian utama pada pertumbuhan ekonomi, dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi pada akhirnya akan menguntungkan manusia. Pembangunan manusia memperkenalkan konsep yang lebih luas dan lebih komprehensif yang mencakup semua pilihan yang dimiliki oleh manusia di semua golongan masyarakat pada semua tahap pembangunan. Pembangunan manusia merupakan perwujudan tujuan jangka panjang dari suatu masyarakat dan meletakkan pembangunan di sekeliling manusia, bukan manusia di sekeliling pembangunan.

Dalam rangka untuk tersedianya data yang dapat mengukur keberhasilan pembangunan di Kabupaten Samosir, dilakukan penelitian dan penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian tersebut selain untuk melihat perkembangan kualitas sumber daya

manusia, juga untuk melihat hubungan IPM tersebut dengan pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan diadakannya analisis ini adalah untuk melihat perkembangan pembangunan manusia Kabupaten Samosir periode 2005-2008, serta membandingkan hasil yang dicapai dengan kabupaten lain di Propinsi Sumatera Utara.

1.3. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyajian yang dikemukakan dalam publikasi ini dikelompokkan menurut susunan sebagai berikut :

- BAB 1 : Pendahuluan, yang berisi latar belakang dari penulisan ini beserta batasan masalah, serta maksud dan tujuannya.
- BAB 2 : Uraian teoritis
- BAB 3 : Metodologi, yang berisi sumber data yang digunakan, metode penghitungan pemerataan pendapatan, konsep dan definisi, serta metode analisis yang digunakan
- BAB 4 : Kondisi Umum, yang berisi mengenai letak geografi, kependudukan, pendidikan, perumahan, dan perekonomian di Kabupaten Samosir.
- BAB 5 : Merupakan bagian utama yang mengulas tentang komponen-komponen IPM, status IPM, reduksi shortfall, dan hubungan antara IPM dan Perekonomian.

<http://samosirkab.bps.go.id>

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1. Konsep Pembangunan Manusia

2.2. Pembangunan Manusia Indonesia Seutuhnya

2.3. IPM : Pengukuran Pencapaian Pembangunan

**2.4. Pemanfaatan IPM dalam Perencanaan
Pembangunan**

2.5. Kedudukan IPM dalam Pembangunan Daerah

2.6. Sistem Informasi Pembangunan Manusia

**2.7. Sumber Data Pemantauan Pembangunan
Manusia dan Kerangka Kerjasama**

URAIAN TEORITIS

2.1. KONSEP PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PENGUKURAN

UNDP mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Dalam konsep tersebut penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (*the ultimate end*) sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana (*principal means*) untuk mencapai tujuan itu. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, empat hal pokok yang perlu diperhatikan adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan, pemberdayaan (UNDP, 1995 : 12). Secara ringkas empat hal pokok tersebut mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Produktivitas

Penduduk harus diberdayakan untuk meningkatkan produktivitas dan untuk berpartisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan (nafkah) dan lapangan pekerjaan. Pembangunan ekonomi, yang demikian merupakan himpunan bagian dari model pembangunan manusia.

2. Pemerataan

Penduduk harus memiliki kesempatan/peleluang yang sama untuk mendapatkan akses terhadap semua sumber daya ekonomi dan sosial. Semua hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus dihapus, sehingga mereka dapat mengambil

manfaat dari kesempatan yang ada dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup.

3. Kestinambungan

Akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial harus dipastikan tidak hanya untuk generasi-generasi yang akan datang. Semua sumber daya fisik, manusia, dan lingkungan harus selalu diperbaharui (*replenished*).

4. Pemberdayaan

Penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan (bentuk/arah) kehidupan mereka, serta untuk berpartisipasi dan mengambil manfaat dari proses pembangunan.

Sebenarnya paradigma pembangunan manusia tidak berhenti sampai disana. Pilihan-pilihan tambahan yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat luas seperti kebebasan politik, ekonomi dan sosial, sampai kesempatan untuk menjadi kreatif dan produktif, dan menikmati kehidupan yang sesuai dengan harkat pribadi dan jasmani hak-hak azasi manusia merupakan bagian dari paradigma tersebut. Dengan demikian, paradigma pembangunan manusia memiliki dua sisi. Sisi pertama berupa formasi kapabilitas manusia seperti perbaikan taraf kesehatan, pendidikan dan keterampilan. Sisi lainnya adalah pemanfaatan kapabilitas mereka untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif, kultural, sosial dan politik. Jika kedua sisi itu tidak seimbang maka hasilnya adalah frustrasi masyarakat (UNDP, 1965 : II).

Konsep pembangunan manusia dalam pengertian di atas jauh lebih dari pada teori pembangunan ekonomi yang konvensional termasuk

model pertumbuhan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia (SDM), pendekatan kesejahteraan dan pendekatan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Model pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan peningkatan pendapatan dan produksi nasional (GNP). Pembangunan SDM menempatkan manusia terutama sebagai input dari proses produksi (sebagai suatu sarana bukan tujuan). Pendekatan kesejahteraan melihat manusia sebagai pemanfaat (*benefichartes*) bukan sebagai subjek perubahan dalam pembangunan. Pendekatan kebutuhan dasar memfokuskan pada penyediaan barang dan jasa kebutuhan hidup.

Namun demikian, pembangunan ekonomi atau lebih tepat pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat bagi tercapainya pembangunan manusia, karena pembangunan ekonomi terjamin peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan melalui penciptaan kesempatan kerja. Menurut UNDP (1996) hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi bersifat timbal balik seperti disajikan pada Gambar 1 artinya, pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pembangunan manusia. Arah panah bawah-atas menegaskan arti penting pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan manusia. Sukar dibayangkan ada negara yang dapat menjalankan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tanpa pertumbuhan ekonomi yang memadai. Arah panah atas-bawah yang merupakan asumsi dasar pendekatan SDM merupakan penegasan adanya alasan ekonomis (*economic reasons*) dari pembangunan manusia yang keabsahannya terus ditunjang oleh bukti-bukti empiris.

Akan tetapi hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia secara empiris terbukti tidak bersifat otomatis. Artinya, banyak negara (atau wilayah) yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat tanpa diikuti oleh pembangunan manusia yang seimbang contoh : China dan negara di Asia Timur lainnya. Sebaliknya, banyak pula negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi pada tingkat yang sedang tetapi terbukti dapat meningkatkan kinerja pembangunan manusia secara mengesankan contoh : Sri Lanka, Kosta Rika serta Trinidad Tobago. Bukti empiris ini tidak berarti bahwa pertumbuhan ekonomi tidak penting bagi pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi justru merupakan sarana utama bagi pembangunan manusia, terutama pertumbuhan ekonomi yang merata secara sektoral dan kondusif terhadap penciptaan lapangan kerja. Hubungan yang tidak otomatis ini sesungguhnya merupakan tantangan bagi pelaksana pemerintahan untuk merancang kebijakan yang mantap, sehingga hubungan keduanya saling memperkuat.

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia berlangsung melalui dua macam jalur. Jalur pertama melalui kebijaksanaan dan pengeluaran pemerintah. Dalam hal ini faktor yang menentukan adalah pengeluaran pemerintah untuk sub sektor sosial yang merupakan prioritas seperti pendidikan dan kesehatan dasar. Besarnya pengeluaran itu merupakan indikasi besarnya komitmen pemerintah terhadap pembangunan manusia. Jalur kedua adalah melalui kegiatan pengeluaran rumahtangga. Dalam hal ini faktor yang menentukan adalah besar dan komposisi pengeluaran rumahtangga untuk kebutuhan dasar

seperti pemenuhan nutrisi anggotanya, untuk biaya pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar, serta untuk kegiatan lain yang serupa. Selain pengeluaran pemerintah dan pengeluaran rumahtangga hubungan antara kedua variabel itu berlangsung melalui penciptaan lapangan kerja. Aspek ini sangat penting karena sesungguhnya, penciptaan lapangan kerja merupakan “ jembatan utama “ yang mengkaitkan antara keduanya (*UNDP, 1966 : 87*).

Hubungan atas bawah antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia pada gambar 1 adalah jelas. Melalui upaya pembangunan manusia kemampuan dasar dan keterampilan tenaga kerja termasuk petani, pengusaha dan manager akan meningkat. Selain itu, pembangunan manusia akan mempengaruhi jenis produksi domestik, kegiatan riset dan pengembangan teknologi yang pada akhirnya akan mempengaruhi komposisi output dan ekspor suatu negara. Kuatnya hubungan timbal balik antara pertumbuhan dan pembangunan manusia akan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor kelembagaan pemerintah, distribusi sumber daya swasta dan masyarakat, modal sosial, LSM dan organisasi kemasyarakatan.

Faktor kelembagaan pemerintah jelas peranannya karena keberadaan sangat menentukan implementasi suatu kebijakan publik. Faktor distribusi sumber daya juga jelas karena tanpa distribusi sumber daya yang merata (misalnya dalam penguasaan lahan atau sumber daya ekonomi lainnya) hanya akan menimbulkan frustrasi masyarakat. Faktor modal sosial menegaskan arti penting peranan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Inti dari modal sosial adalah

2.2. KONSEP PEMBANGUNAN MANUSIA SEUTUHNYA

Konsep pembangunan manusia seutuhnya merupakan konsep yang menghendaki peningkatan kualitas hidup penduduk baik secara fisik, mental maupun secara spritual. Bahkan secara eksplisit disebutkan bahwa pembangunan yang dilakukan menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia yang seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan sumber daya manusia yang seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan sumber daya manusia secara fisik dan mental mengandung makna peningkatan kapasitas dasar penduduk yang kemudian akan memperbesar kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan yang berkelanjutan.

Penciptaan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha ditempuh secara makro ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Dengan tumbuhnya kesempatan kerja dan berusaha memungkinkan peningkatan pendapatan penduduk yang secara nyata kemudian mengurangi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Hal ini merupakan ‘jembatan utama’ dalam meningkatkan daya beli melalui pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya merupakan prinsip pemerataan.

Pembangunan bidang sosial yang sangat mengesankan adalah upaya pengendalian jumlah penduduk melalui program keluarga berencana. Upaya ini secara nyata telah berhasil menurunkan angka kelahiran di Indonesia hingga setengahnya, dari 5,6 pada tahun 1971 menjadi sekitar 2,8 pada tahun 1995 yang kemudian berpengaruh pada

pengurangan laju pertumbuhan penduduk. Dari sudut pandang pembangunan, keberhasilan mengurangi laju pertumbuhan penduduk dalam konteks Indonesia, sesungguhnya merupakan upaya yang akan mempercepat terjadinya peningkatan kualitas hidup, oleh karena bagian terbesar penduduk Indonesia ditinjau dari berbagai indikator sosial berada pada tingkatan kualitas yang masih rendah.

2.3. IPM : PENGUKURAN PENCAPAIAN PEMBANGUNAN

Pembangunan manusia menyangkut dimensi yang sangat luas. Upaya membuat pengukuran pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan di suatu wilayah harus dapat memberikan gambaran tentang dampak dari pembangunan manusia bagi penduduk dan sekaligus dapat memberikan gambaran tentang persentase pencapaian terhadap sasaran ideal. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit tunggal yang walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, tetapi mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar (*basic capabilities*) penduduk. Ketiga kemampuan dasar itu adalah umur panjang dan sehat mengukur peluang hidup ataupun harapan hidup, berpengetahuan dan berketrampilan, serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak.

Indeks Pembangunan Manusia, karena dimaksudkan untuk mengukur dampak dari upaya peningkatan kemampuan dasar tersebut, dengan demikian menggunakan indikator dampak sebagai komponen

dasar penghitungannya yaitu, angka harapan hidup waktu lahir (e^0), pencapaian pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, serta pengeluaran konsumsi. Nilai IPM suatu negara atau wilayah menunjukkan seberapa jauh negara atau wilayah itu telah mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup 85 tahun, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat (tanpa kecuali), dan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup layak. Semakin dekat nilai IPM suatu wilayah terhadap angka 100, semakin dekat jalan yang harus ditempuh untuk mencapai sasaran itu.

Karena hanya mencakup tiga komponen itu maka Indeks Pembangunan Manusia harus dilihat sebagai penyederhanaan dari realitas yang kompleks yang tercermin dari luasnya dimensi pembangunan manusia. Oleh karena itu pesan dasar IPM perlu dilengkapi dengan kajian dan analisis yang dapat mengungkapkan dimensi-dimensi pembangunan manusia yang penting lainnya (yang tidak seluruhnya dapat diukur) seperti kebebasan politik, kesinambungan lingkungan, pemerataan antar generasi.

Indeks Pembangunan Manusia merupakan alat ukur yang peka untuk dapat memberikan gambaran perubahan yang terjadi, terutama pada komponen daya beli yang dalam kasus Indonesia sudah sangat merosot akibat krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997. Krisis ekonomi dan moneter tersebut berdampak pada menurunnya tingkat pendapatan yang diakibatkan banyaknya PHK dan menurunnya kesempatan kerja yang kemudian dipengaruhi tingkat inflasi yang meningkat dari 6 % menjadi 78 % selama periode 1997–1998.

Menurunnya tingkat kesempatan kerja atau meningkatnya tingkat pengangguran (4,7 % tahun 1997 menjadi 5,5 % tahun 1998) dalam konteks pembangunan manusia merupakan terputusnya jembatan yang menghubungkan antara pertumbuhan ekonomi dengan upaya peningkatan kapasitas dasar penduduk.

Dampak dari krisis ekonomi pada pembangunan manusia adalah dengan menurunnya daya beli dan ini juga berarti terjadinya penundaan upaya peningkatan kapasitas fisik dan kapasitas intelektual penduduk. Penurunan beberapa komponen IPM sebagai akibat kepekaan IPM sebagai alat ukur yang dapat menangkap perubahan nyata yang dialami penduduk dalam jangka pendek.

2.4. PEMANFAATAN IPM DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Konsep pembangunan manusia mempunyai cakupan yang sangat luas, melingkupi hampir seluruh aspek kehidupan manusia mulai dari kebebasan untuk menyatakan pendapat, untuk menyatakan kesetaraan gender, untuk memperoleh pekerjaan, untuk menjaga gizi anak, untuk dapat membaca dan menulis. Indeks pembangunan manusia (IPM) di lain pihak mempunyai cakupan yang sempit. Meskipun IPM mencoba untuk mengukur tingkat pembangunan manusia, indeks ini hanya mampu mengukur sebagian saja. Kondisi ini disebabkan karena berbagai aspek sangat sulit untuk diukur atau dikumpulkan datanya. namun bagaimanapun juga IPM lebih memadai dan lebih menyeluruh sebagai

ukuran pembangunan dibanding ukuran tunggal pertumbuhan PDRB perkapita.

Sebagai ukuran komposit tunggal, IPM (antara 0 – 100) mengartikan tingkatan status pembangunan manusia di suatu wilayah yang kemudian akan berfungsi sebagai patokan dasar perencanaan jika dibandingkan :

- i. Antar waktu untuk memberikan gambaran kemajuan setelah suatu periode, atau
- ii. Antar wilayah untuk memberikan gambaran tentang tingkat kemajuan suatu wilayah relatif terhadap wilayah lain.

Untuk lebih memberikan petunjuk tentang status pembangunan manusia di suatu wilayah, sebagai alat ukur komposit, IPM harus dikaitkan dengan setiap indikator komponennya dan berbagai indikator lain yang relevan.

Di sektor perencanaan, pemanfaatan IPM terbatas hanya sebagai patokan dasar. Oleh karena itu perumusan kebijakan yang lebih terarah, suatu kajian tentang situasi pembangunan manusia perlu dilakukan disuatu wilayah untuk memberikan petunjuk yang lebih jelas tentang arah kebijakan pembangunan di masa yang akan datang.

Dalam merumuskan kebijakan pembangunan, perlu diperhatikan tingkat pencapaian setiap tahun. Karena itu kajian tentang pencapaian upaya pembangunan manusia perlu dilakukan dalam suatu periode tertentu, yang memberi kesempatan untuk mengkaji dampak dari program bagi peningkatan kapasitas dasar penduduk. Tingkat pencapaian setiap tahun menuju status pembangunan manusia yang ideal (*reduction in*

shortfall) yang telah dihasilkan pada suatu periode merupakan validasi bagi kebijakan pembangunan yang telah diputuskan pada periode tersebut.

2.5. KEDUDUKAN IPM DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan merupakan realisasi dari aspirasi dan tujuan suatu bangsa yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan secara struktural melalui upaya sistematis dan terencana. Proses perencanaan meliputi pemantauan dan evaluasi terhadap berbagai program yang telah diimplementasikan pada periode sebelumnya. Suatu kajian yang membahas situasi dan kondisi yang obyektif tentang permasalahan pokok yang dihadapi dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan, karenanya perlu dilakukan untuk menentukan pentahapan, pencapaian tujuan jangka panjang, tujuan jangka menengah dan tujuan jangka pendek serta untuk menentukan prioritas. Melalui kajian tersebut dirumuskan suatu kebijakan umum yang akan menjadi pedoman bagi para perencana dalam merancang berbagai program.

Dalam konteks pembangunan daerah, IPM ditetapkan sebagai salah satu ukuran utama yang dicantumkan dalam manajemen pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Hal ini merupakan langkah penting karena Indeks Pembangunan Manusia menduduki salah satu posisi penting dalam manajemen pembangunan daerah, oleh karena pelaksanaan pembangunan secara luas juga meliputi unsur perencanaan, pemantauan dan evaluasi. Fungsi IPM

dan indikator pembangunan manusia lainnya akan menjadi kunci bagi terlaksananya perencanaan pembangunan yang terarah.

Kedudukan dan peranan Indeks Pembangunan Manusia dalam manajemen pembangunan akan lebih terlihat kalau dilengkapi dengan suatu data set yang berisikan indikator yang relevan dengan IPM dan disusun sebagai suatu sistem data base pembangunan manusia. Sistem data base tersebut merupakan sumber data utama dalam identifikasi lebih lanjut yang dilakukan untuk mengenali lebih dalam permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan upaya dan hasil-hasil serta dampak pembangunan manusia. Identifikasi tersebut dibuat ke dalam suatu analisis situasi pembangunan manusia yang mengkaji berbagai kendala dalam implementasi program pembangunan pada periode sebelumnya dan potensi yang dimiliki suatu wilayah untuk dimasukkan sebagai masukan dalam perencanaan pembangunan daerah periode yang akan datang. Proses ini merupakan kajian yang dapat menghasilkan rekomendasi bagi implikasi kebijakan pembangunan yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, maka IPM merupakan alat advokasi kepada para pengambil keputusan dan perumus kebijakan tentang langkah-langkah pada masa mendatang yang perlu dilakukan.

Penempatan IPM sebagai salah satu ukuran dan patokan dasar dalam penentuan sasaran dan tujuan pembangunan daerah ditetapkan setelah berbagai kajian metodologis dan empirik yang dilakukan, serta ujicoba pemanfaatan IPM dalam perencanaan pembangunan daerah perlu dilakukan.

2.6. SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN MANUSIA

Analisis situasi merupakan suatu tahapan dalam proses perencanaan yang lazimnya dilakukan setelah visi dan sasaran jangka panjang ditetapkan. Analisis situasi yang cermat dan menyeluruh akan mempermudah tahapan perencanaan berikutnya yaitu penetapan prioritas dan sasaran jangka menengah dan jangka pendek serta mengidentifikasi pilihan kebijakan untuk mencapai sasaran yang sudah ditetapkan. Dalam kerangka pembangunan manusia, analisis situasi harus dilakukan secara menyeluruh dalam arti mencakup semua aspek yang dianggap berkaitan dengan konsep global pembangunan manusia. Aspek-aspek yang dikaji dalam analisis tersebut disebut sebagai isu pembangunan manusia.

Indeks Pembangunan Manusia sebagai alat ukur status pembangunan manusia sangat sensitif terhadap perubahan yang sedang terjadi, sehingga IPM merupakan sistem informasi pembangunan manusia yang memusatkan perhatian pada kemajuan dan pencapaian program sektoral serta kajiannya dengan program nasional. Pada tingkat kabupaten/kotamadya kajian ini disebut Analisis Situasi Pembangunan Manusia karena hanya mengkaji kemajuan dan pencapaian suatu wilayah, sedangkan pada tingkat propinsi kajian ini disebut Laporan Pembangunan Manusia karena juga mengkaji perbandingan kemajuan dan pencapaian antar wilayah kabupaten/kota dan indikator yang terhimpun dalam Sistem Informasi Pembangunan Manusia dan diperkaya dengan permasalahan yang spesifik dari daerah yang dikemukakan.

2.7. SUMBER DATA PEMANTAUAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KERANGKA KERJASAMA

Data yang terhimpun dalam Sistem Informasi Pembangunan Manusia adalah data yang dapat menggambarkan status pembangunan manusia pada tahun yang bersangkutan dan pencapaiannya. Pada tahun-tahun berikutnya tiap tahun akan diperbaharui data-datanya dengan data yang baru, sehingga pemantauan tentang upaya pembangunan manusia dapat dilakukan secara berkesinambungan setiap tahun.

Pemanfaatan data yang dihasilkan Badan Pusat Statistik untuk perencanaan secara intensif baru dilakukan di tingkat pusat. Di tingkat propinsi pemanfaatan data statistik belum seintensif yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik di tingkat pusat, terlebih lagi pemanfaatan di tingkat kabupaten/kota yang sangat sedikit. Hal ini terjadi karena dalam sistem pengumpulan data BPS sangat jarang dihasilkan data yang terpadu yang dapat mengkaitkan berbagai macam variabel agar dapat mengungkapkan fenomena dan perkembangan yang terjadi secara representatif untuk tingkat kabupaten/kota.

Dalam hal ini BPS sejak 1993 telah merancang Survei Sosial Ekonomi Nasional agar menjadi suatu alat untuk mengkaji dan memantau pelaksanaan pembangunan sektor sosial atau kesejahteraan rakyat serta pencapaian pembangunan manusia pada tingkat kabupaten dan kotamadya setiap tahun. Selain itu, data SUSENAS dapat digunakan untuk mengkaji kaitan antar variabel sektoral misalnya: kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, perumahan, pengeluaran dan konsumsi

rumah tangga untuk dapat mengungkapkan perkembangan fenomena tertentu misalnya perkembangan atau peningkatan kualitas hidup yang setiap tahun di masing-masing kabupaten/kota.

Pemanfaatan secara optimal dari data yang dihasilkan oleh BPS Kabupaten/kota akan sangat membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah. Data yang semestinya dimanfaatkan dalam pembangunan daerah bukan saja data bidang sosial, tetapi juga data bidang ekonomi seperti PDRB, dan Statistik Keuangan Daerah yang bersama data pencatatan administrasi hasil pelayanan instansi sektoral akan memperkaya ketersediaan data dan kajian yang diperlukan para pengambil keputusan dan perumusan kebijakan di tingkat daerah. Dalam konteks ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Propinsi/Kabupaten/Kota) memerlukan dukungan BPS propinsi maupun kabupaten/kota dalam hal penyediaan data dan kajian yang diperlukan dalam penyusunan dan merancang program pembangunan. Karena itu adalah penting untuk mendayagunakan data yang dihasilkan oleh BPS. Dalam hal ini pendayagunaan akan lebih ditekankan pada data yang banyak digunakan dalam kerangka pembangunan manusia pada tingkat implementasi program sebenarnya merupakan pembangunan sektor kesejahteraan rakyat. Sedangkan untuk merencanakan, memantau dan mengevaluasi pembangunan manusia dalam suatu wilayah diperlukan suatu kelompok kerja yang beranggotakan Bappeda, BPS, instansi sektoral dan universitas yang mempunyai dua fungsi utama. Fungsi pertama adalah upaya memperbaharui data dalam sistem informasi yang dapat dilakukan oleh

BPS Propinsi maupun BPS Kabupaten/Kota dengan dukungan Bappeda Propinsi maupun Bappeda kabupaten/kota. Fungsi kedua adalah membuat analisis situasi pembangunan manusia memanfaatkan data yang telah ada tersedia di daerah masing-masing. Kegiatan ini dilakukan oleh kelompok kerja secara bersama-sama dengan dukungan dan dipimpin oleh Bappeda. Pemantauan yang dilakukan ini merupakan kerja bersama antar sektor ataupun disebut kerangka kerjasama BPS–Bappeda.

<http://samosirkab.bps.go.id>

BAB III

METODOLOGI

3.1. Sumber Data

3.2. Metodologi & Tahapan Penghitungan IPM

3.3. Konsep dan Definisi

<http://samodiripb.bps.go.id>

METODOLOGI

3.1. SUMBER DATA

Sumber data utama yang digunakan adalah hasil pendataan dipadukan dengan SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) 2007 yang dilaksanakan pada bulan Juli di seluruh wilayah Indonesia. rumahtangga.

Dari data Susenas (kor) 2008 dapat dihitung kesenjangan pendapatan penduduk baik dengan metode gini ratio maupun kriteria bank dunia, serta dapat melihat ciri-ciri penduduk berpendapatan rendah. Pengolahan data Susenas terdiri dari beberapa tahap yaitu :

1. **Receiving**, yang merupakan proses pemeriksaan kelengkapan jumlah dokumen hasil pencacahan dilapangan.
2. **Editing dan coding**, yang merupakan proses pemeriksaan daftar isian (kuesioner) hasil pencacahan dilapangan. Pada tahap ini diadakan pemeriksaan isian mengenai kelengkapan isian dan konsistensi antar isian. Selain itu juga dilakukan pengisian kode-kode tertentu sesuai keperluan pengolahan.
3. **Entry**, yang merupakan proses perekaman data atau memindahkan data pada kuesioner ke media komputer.
4. **Validasi**, proses ini merupakan pengecekan kembali mengenai kewajaran dan konsistensi antar isian yang dilakukan oleh media komputer.

5. **Tabulasi**, proses ini merupakan tahap akhir pengolahan data Susenas, dimana tahap ini sangat penting dan menjadi dasar dalam proses analisis terhadap data Susenas yang dihasilkan.

3.2. METODOLOGI DAN TAHAPAN PENGHITUNGAN IPM

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)* merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yaitu usia hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent living*). Secara umum metode penghitungan IPM yang disajikan dalam publikasi ini sesuai dengan metode yang digunakan *The United Nations Development Programme (UNDP)* dalam menghitung HDI. Selain itu, dalam proses penghitungan IPM ini BPS memperoleh bantuan konsultasi teknis secara langsung kantor pusat dari Metode yang sama digunakan BPS untuk menghitung IPM antar Propinsi.

3.2.1. Komponen-Komponen IPM

3.2.1a. Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup diukur dengan angka harapan hidup waktu lahir (*life expectancy at birth*) yang biasa dinotasikan dengan e^0 . Karena Indonesia tidak memiliki sistem vital registrasi yang baik maka e^0 dihitung dengan metode tidak langsung. Metode ini menggunakan dua macam data dasar yaitu rata-rata anak yang dilahirkan hidup (*live-births*) dan rata-rata anak yang masih hidup (*still living*) per wanita usia 15-49

tahun menurut kelompok umur lima tahunan. Penghitungan e^0 dilakukan dengan menggunakan software *Mortpak Lite*. Angka e^0 yang diperoleh dengan metode tidak langsung ini merujuk pada keadaan 3-4 tahun dari tahun survei.

3.2.1b. Pengetahuan

Seperti halnya UNDP komponen IPM pengetahuan diukur dengan dua indikator yaitu angka melek huruf (*literacy rate*) penduduk 10 tahun keatas dan rata-rata lama sekolah (*mean-years of schooling*). Sebagai catatan, UNDP dalam publikasi tahunan HDI sejak 1995 mengganti rata-rata lama sekolah dengan partisipasi sekolah dasar, menengah, dan tinggi karena alasan kesulitan memperoleh datanya sekalipun diakui bahwa indikator yang kedua kurang sesuai sebagai indikator dampak.

Angka melek huruf (AMH) diolah dari variabel kemampuan membaca dan menulis, sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) dihitung menggunakan tiga variabel secara simultan yaitu partisipasi sekolah, tingkat/kelas yang sedang/ pernah dijalani, dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

3.2.1c. Standar Hidup Layak

Berbeda dengan UNDP yang menggunakan indikator GDP per kapita riil yang telah disesuaikan (*adjusted real GDP per capita*) sebagai indikator standar hidup layak. Penulisan ini menggunakan indikator "rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan" (*adjusted real per capita expenditure*) atau disebut juga daya beli (DB). Sumber data yang digunakan adalah Susenas dan survei lain yang mendukung.

3.2.2. Tahapan Penghitungan IPM

1. Tahapan pertama penghitungan IPM adalah menghitung indeks masing-masing komponen IPM (e^0 , Pengetahuan, dan Standard Hidup Layak) dengan hubungan matematis sebagai berikut:

$$\text{Indek } (X_i) = (X_i - X_{\min}) / (X_{\max} - X_{\min})$$

X_i = Indikator komponen Indeks Pembangunan Manusia ke-I
($i=1,2,3$)

X_{\min} = Nilai minimum X_i

X_{\max} = Nilai maksimum X_i

persamaan di atas akan menghasilkan nilai $0 \leq X_i \leq 1$, untuk mempermudah cara membaca, skala dinyatakan dalam 100 persen sehingga interval nilai menjadi $0 \leq X_i \leq 100$

2. Tahapan kedua penghitungan IPM adalah menghitung rata-rata sederhana dari masing-masing indeks X_i dengan hubungan matematis :

$$\begin{aligned} \text{Indeks Pembangunan Manusia (IPM)} &= 1/3 X_i \\ &= 1/3 (X(1) + X(2) + X(3)) \end{aligned}$$

dimana :

$X(1)$ =Indeks Angka Harapan Hidup (AHH)

$X(2)$ =2/3 (Indeks Melek Huruf) + 1/3 (Indeks Rata-rata Lama Sekolah)

$X(3)$ =Indeks Konsumen Per Kapita yang disesuaikan

Tabel 1.

Nilai Maksimum dan Minimum Indikator Komponen IPM

Komponen IPM	Nilai Maksimum	Nilai Minimum	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)
Angka Harapan Hidup	85	25	Standar UNDP
Angka Melek Huruf	100	0	Standar UNDP
Rata-rata Lama Sekolah	15	0	Standar UNDP
Daya Beli	737,72	300 (1996) 360 (1999,2002)	UNDP menggunakan PDB riil per kapita yang telah disesuaikan

3.2.3. Penentuan Status IPM

Untuk melihat perkembangan tingkatan status IPM di kabupaten/kota, dibedakan 4 kriteria dimana status menengah dipecah menjadi dua seperti dibawah ini :

1. **Rendah** dengan nilai IPM kurang dari 50.
2. **Menengah Bawah** dengan nilai IPM berada diantara 50 sampai kurang dari 66.

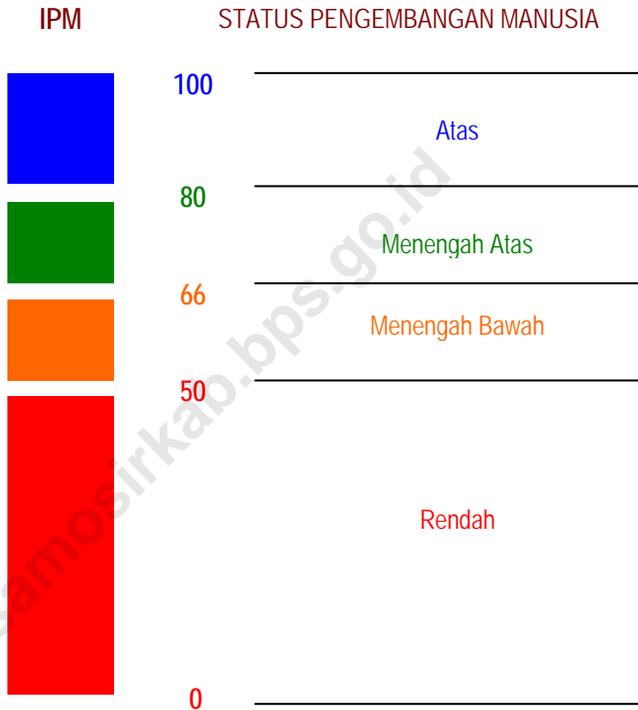
3. **Menengah Atas** dengan nilai IPM berada antara 66 sampai kurang dari 80.
4. **Tinggi** dengan nilai IPM lebih atau sama dengan 80.

Sedangkan lebih terurai dijelaskan tentang pembagian status indeks pembangunan manusia seperti tergambar dalam gambar di bawah ini :

Jika status pembangunan manusia masih berada pada kriteria rendah hal ini berarti kinerja pembangunan manusia daerah tersebut masih memerlukan perhatian khusus untuk mengejar ketinggalannya. Begitu juga jika status pembangunan manusia masih berada pada kriteria menengah hal ini berarti pembangunan manusia masih perlu ditingkatkan.

Jika daerah tersebut mempunyai status pembangunan manusia tinggi hal ini berarti kinerja pembangunan manusia daerah tersebut sudah baik/optimal maka perlu dipertahankan supaya kualitas sumber daya manusia tersebut lebih produktif sehingga memiliki produktivitas yang tinggi.

Gambar 2 :
STATUS INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA



3.3. KONSEP DAN DEFINISI

3.3.1. Rumahtangga dan Anggota Rumahtangga

Rumahtangga dalam hal ini dibedakan menjadi dua, yaitu rumahtangga biasa dan rumahtangga khusus :

- 1). **Rumahtangga biasa** adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya makan bersama dari satu dapur. Yang dimaksud dengan makan dari satu dapur adalah jika penggunaan kebutuhan sehari-harinya dikelola bersama menjadi satu. Selain rumahtangga biasa yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak, yang juga dianggap sebagai rumahtangga biasa antara lain :
 - Seseorang yang menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus dan mengurus makanannya secara sendiri.
 - Keluarga yang tinggal terpisah di dua bangunan sensus tetapi makannya dari satu dapur asal kedua bangunan tersebut masih dalam satu segmen.
 - Suatu rumahtangga yang menerima pondokan dengan makan (indekos) yang pemondoknya kurang dari 10 orang.
 - Pengurus asrama, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan dan sejenisnya yang tinggal sendiri maupun bersama anak, istri serta anggota rumahtangga lainnya, makan dari satu dapur yang terpisah dari lembaga yang diurusnya.
 - Masing-masing orang yang bersama-sama menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus tetapi mengurus makannya sendiri.

- 2). **Rumahtangga khusus**, yaitu orang-orang yang tinggal di asrama, tangsi, panti asuhan. lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, sekelompok orang yang mondok dengan makan (indekos) dan berjumlah 10 orang atau lebih, **tidak dicakup dalam survei ini.**

3.3.2. Pendidikan

Sekolah adalah sekolah formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, termasuk juga pendidikan yang disamakan.

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah suatu jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan baik di sekolah negeri atau swasta yang ditandai dengan adanya tanda tamat belajar/ ijazah.

Angka Melek Huruf adalah persentase penduduk 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis baik huruf latin maupun huruf lainnya.

3.3.3. Perumahan dan Lingkungan

Luas lantai adalah luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari. Bagian-bagian yang digunakan bukan untuk keperluan sehari-hari tidak dimasukkan dalam penghitungan luas lantai seperti lumbung padi, kandang ternak, jemuran, dan warung (sebatas atap)

Dinding adalah sisi luar batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan rumahtangga atau bangunan lain.

Atap adalah penutup bagian atau suatu bangunan sehingga orang yang mendiami di bawahnya terlindung dari teriknya matahari, hujan, dan

sebagainya. Untuk bangunan bertingkat, atap yang dimaksud adalah bagian teratas dari bangunan tersebut.

3.3.4. Konsumsi/Pengeluaran

Rata-rata pengeluaran per kapita/bulan adalah rata-rata biaya yang dikeluarkan rumahtangga sebulan untuk konsumsi semua anggota rumahtangga dibagi dengan banyaknya anggota rumahtangga.

<http://samosirkab.bps.go.id>

BAB IV

KONDISI UMUM KABUPATEN SAMOSIR

4.1. Kependudukan

4.2. Pendidikan

4.3. Perumahan

4.4. Perekonomian

<http://samosirrab.pps.go.id>

KONDISI UMUM KABUPATEN SAMOSIR

4.1. KEPENDUDUKAN

Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan karena penduduk tidak saja sebagai pelaksana tetapi juga menjadi sasaran dari pembangunan. Oleh sebab itu untuk menunjang keberhasilan pembangunan perkembangan penduduk perlu diarahkan sehingga mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang menguntungkan pembangunan.

Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera menyebutkan bahwa perkembangan kependudukan diarahkan pada *pengendalian kuantitas, perkembangan kualitas, serta pengarahan mobilitas* penduduk, sebagai potensi sumber daya manusia agar menjadi kekuatan pembangunan. Lebih lanjut pasal 4 ayat (1) menyebutkan tujuan dari perkembangan kependudukan, yaitu untuk mewujudkan keserasian, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, persebaran penduduk dengan lingkungan hidup.

Untuk mewujudkan perkembangan penduduk sebagaimana ditetapkan oleh UU No.10 Tahun 1992 tersebut perlu ditetapkan kebijaksanaan dalam hal kuantitas penduduk yang berhubungan dengan penetapan jumlah, struktur dan komposisi, pertumbuhan dan persebaran yang ideal, sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

4.1.1 Jumlah, dan Persebaran Penduduk

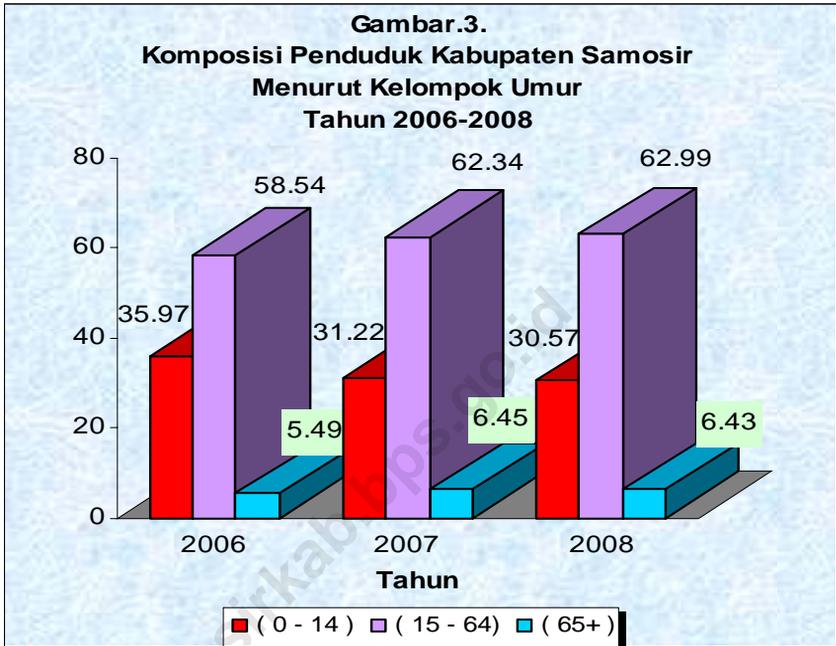
Jumlah penduduk Kabupaten Samosir tahun 2008 adalah 131.549 jiwa. Bila dilihat menurut kecamatan terlihat bahwa penduduk yang terbanyak berada di Kecamatan Pangururan sebanyak 30.069 jiwa atau 23,09 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Samosir. Sedangkan jumlah penduduk terendah ada di Kecamatan Harian yaitu sebanyak 6,835 jiwa atau 5,20 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Samosir.

Dari segi kepadatan penduduk, Kabupaten Samosir pada tahun 2008 dihuni sebanyak 91,08 jiwa setiap km persegiunya. Sedangkan jika dilihat menurut kecamatan, variasi kepadatan penduduk adalah kecamatan Pangururan yang terpadat sebesar 247,67 jiwa/km², dan yang jarang penduduknya pada kecamatan Harian yaitu sebesar 12,20 jiwa/km².

4.1.2. Komposisi Umur

Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin merupakan variabel penting dalam demografi. Hampir semua pembahasan mengenai masalah kependudukan melibatkan variabel umur dan jenis kelamin penduduk. Struktur umur penduduk antar daerah satu dengan daerah lain tidak sama. Struktur umur penduduk dipengaruhi oleh tiga variabel demografi, yakni kelahiran, kematian, dan migrasi. Faktor-faktor sosial ekonomi di suatu daerah akan mempengaruhi struktur umur penduduk lewat ketiga variabel diatas.

Struktur umur penduduk akan terlihat lebih sederhana untuk dianalisis jika dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar, yaitu 0-14 tahun, 15-64 tahun, dan 65 tahun ke atas.



Sumber : BPS Kabupaten Samosir

Suatu wilayah dikatakan mempunyai struktur umur muda jika proporsi penduduk usia dibawah 15 tahun (0-14) tahun lebih atau sama dengan 40 persen dan kelompok penduduk berusia 15-64 tahun kurang atau sama dengan 55 persen, sementara proporsi kelompok umur usia 65 tahun ke atas kurang atau sama dengan 5 persen. Sebaliknya suatu struktur umur penduduk dikatakan tua jika proporsi penduduk usia 0-14 tahun kurang dari atau sama dengan 30 persen dan kelompok penduduk berusia 15-64 tahun lebih besar atau sama dengan 60 persen, sementara proporsi kelompok usia 65 persen lebih atau sama dengan 10 persen. Berdasarkan umur median suatu negara atau daerah termasuk penduduk muda apabila memiliki umur median penduduk kurang atau

sama dengan 20 tahun, intermediate apabila umur mediannya 10-30 tahun dan penduduk tua apabila umur mediannya lebih besar atau sama dengan 30 tahun.

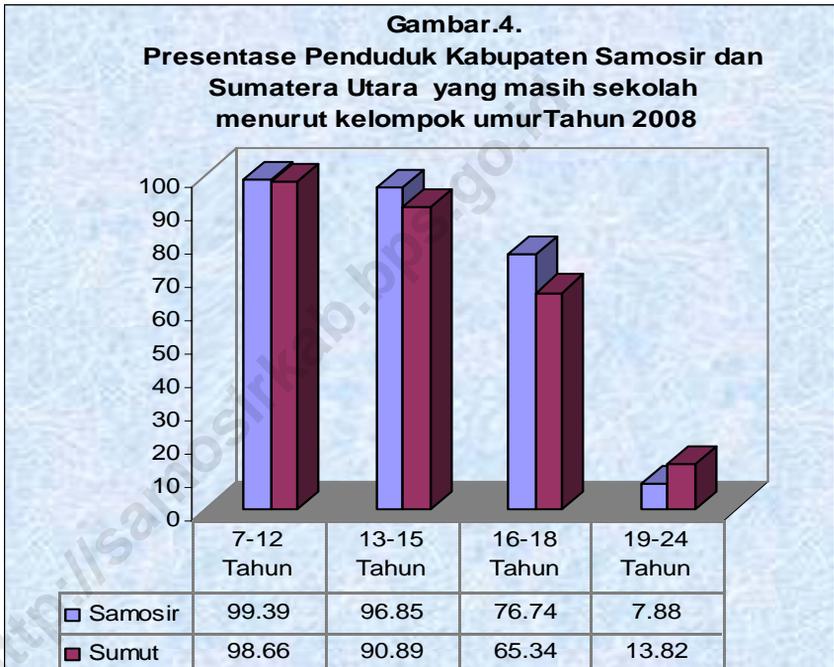
Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa struktur umur Kabupaten Samosir dapat dikategorikan kelompok penduduk intermediate yang tidak tergolong tua dan juga tidak muda, dimana proporsi penduduk umur 0-14 tahun pada tahun 2008 sebesar 30,57 persen, umur 15-64 tahun sebesar 62,99 persen, sedangkan proporsi penduduk usia 65 tahun ke atas yaitu hanya sebesar 6,43 persen. Hal tersebut diduga akibat masih tingginya kelahiran dan migrasi keluar penduduk usia produktif di kabupaten ini. Sebagai akibat dari keadaan ini maka kebijakan pemerintah harus lebih banyak memberikan perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan penduduk terutama di bidang pendidikan dan lapangan kerja.

4.2. PENDIDIKAN

Salah satu amanat yang diemban pemerintah menurut UUD'45 adalah upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejauh mana amanat ini dilaksanakan tercermin antara lain dari profil pendidikan penduduk yang akan dibahas secara singkat dalam uraian berikut yang menyajikan gambaran umum mengenai kemampuan baca-tulis penduduk, tingkat pendidikan (formal) yang dicapai, status pendidikan, dan kemampuan berbahasa Indonesia.

4.2.1. Partisipasi Sekolah

Gambar 4 menyajikan perbandingan partisipasi sekolah penduduk menurut kelompok umur antara Kabupaten Samosir dan Propinsi Sumatera Utara secara keseluruhan.



Sumber : Susenas 2008 BPS KABUPATEN SAMOSIR

Bila diamati menurut kelompok umur, partisipasi sekolah usia 7-12 tahun di Kabupaten Samosir tahun 2008 sebesar 99,39 persen atau masih terdapat sekitar 0,61 persen penduduk usia 7-12 tahun yang belum menikmati fasilitas pendidikan SD, partisipasi sekolah usia 7-12 tahun mengalami kenaikan bila dibandingkan pada tahun 2007 sebesar 97,90 persen. Sedangkan Angka partisipasi sekolah di Kabupaten

Samosir usia 13-15 tahun pada tahun 2008 sebesar 96,85 persen juga mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2007 yaitu sebesar 95,91 persen, untuk provinsi Sumatera Utara pada tahun 2008 partisipasi sekolah usia 13 – 15 tahun sebesar 90,89 persen, angka tersebut masih dibawah Kabupaten Samosir yaitu 96,85 persen.

Untuk kelompok umur 16 – 18 tahun angka partisipasi sekolah di Kabupaten Samosir pada tahun 2008 adalah 76,74 persen dan untuk rata-rata propinsi Sumatera Utara adalah 65,34 persen Dengan perkataan lain bahwa semakin tinggi kelompok umur angka partisipasi sekolah di Kabupaten Samosir semakin baik bahkan di atas rata-rata propinsi Sumatera Utara.

4.2.2. Tingkat Pendidikan

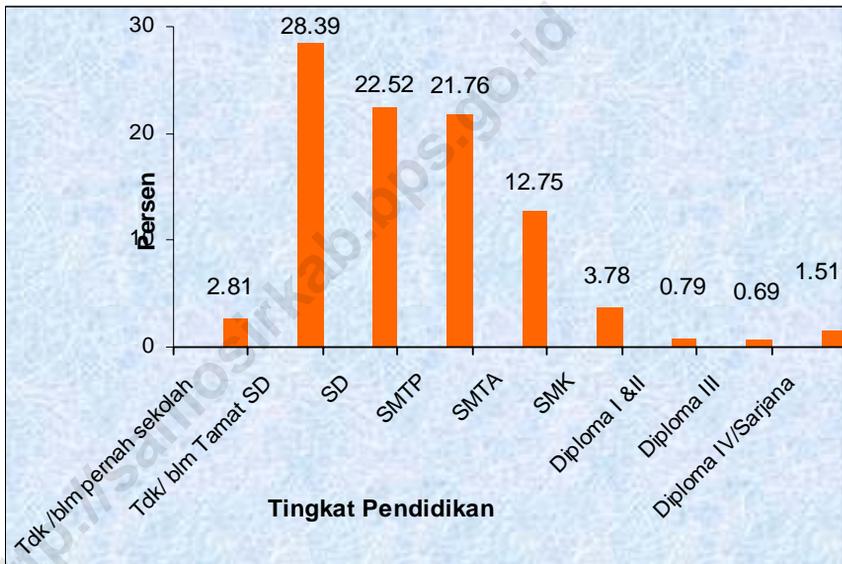
Sebagaimana halnya dengan dengan angka partisipasi sekolah, tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk 10 tahun ke atas juga merupakan salah satu indikator untuk mengukur hasil pembangunan di bidang pendidikan.

Gambar.5. menunjukkan bahwa pada tahun 2008 di Kabupaten Samosir masih terdapat 2,81 persen penduduk berumur 10 tahun ke atas yang “seharusnya” pernah sekolah tetapi pada kenyataannya tidak/belum pernah sekolah, ini mengalami penurunan bila dibandingkan angka tidak/belum pernah sekolah pada tahun 2007 yaitu sebanyak 6,49 persen.

Modus tingkat pendidikan tertinggi di Kabupaten Samosir hanya tamat SD sebanyak 22,52 persen, tamat SMP sebanyak 21,76 persen disusul dengan yang tidak bersekolah lagi sebanyak 65,47 persen,

sedangkan persentase penduduk 10 tahun ke atas yang tamat Universitas hanya sebanyak 1,51 persen pada tahun 2008, angka ini menurun bila dibandingkan pada tahun 2007 sebesar 3,23 persen.

Gambar 5.
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan
Penduduk Kabupaten Samosir usia 10 tahun ke atas
Tahun 2008



Sumber : Susenas 2008 BPS KABUPATEN SAMOSIR

4.3. PERUMAHAN

Disamping kebutuhan akan pangan dan sandang, perumahan juga merupakan salah satu kebutuhan pokok penduduk yang cukup vital. Keadaan tempat tinggal Rumahtangga dapat menggambarkan keberhasilan pembangunan khususnya di bidang perumahan, dan sampai seberapa jauh program perumahan nasional dapat menjangkau golongan masyarakat yang memerlukan perumahan. Apabila masyarakat telah

mampu menempati rumah yang layak, mungkin prioritas program pemerintah di bidang perumahan dapat diturunkan, begitu pula sebaliknya.

Informasi penting mengenai keadaan perumahan yang disajikan dalam publikasi ini adalah kondisi fisik bangunan seperti luas lantai, jenis lantai, jenis atap, dan jenis dinding. Selain menyajikan kondisi fisik bangunan, publikasi ini juga menyajikan fasilitas perumahan seperti sumber penerangan dan sumber air minum.

4.3.1. Kondisi Fisik Bangunan

Luas lantai dapat digunakan sebagai salah satu kriteria untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, karena merupakan salah satu aspek yang dapat menggambarkan keadaan suatu tempat tinggal. Luas lantai terkait dengan tingkat penghasilan rumahtangga karena harga tanah yang semakin mahal saat ini, semakin luas lantai rumah suatu rumahtangga semakin tinggi pula tingkat ekonomi rumahtangga tersebut.

Dari tabel 1.6 terlihat, rumahtangga memiliki rumah dengan luas lantai antara 20-49 m² terdapat 71,68 persen, 5,22 persen rumah mempunyai luas lantai antara 50-59 m², selanjutnya sebanyak 3,32 persen rumah dengan luas lantai 100-149 m², luas 150+ m² sebanyak 1,10 persen. Di lain pihak masih terdapat 1,42 persen rumahtangga yang luas lantainya kurang dari 20 m².

Kriteria lain dari kondisi tempat tinggal Rumahtangga yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan penghuninya adalah Jenis Lantai (Keramik/Semen/Kayu/Tanah).

Dari Tabel 1.7 menunjukkan Rumahtangga yang berlantai Tanah pada tahun 2008 sebanyak 2,84 persen, hal ini menurun bila dibandingkan pada tahun 2007 yaitu sebesar 6,48 persen, namun rumah tangga berlantai lainnya mengalami kenaikan pada tahun 2008 sebesar 97,16 persen.

4.3.2. Fasilitas Perumahan

Hasil pembangunan telah memberikan dampak yang luas kepada masyarakat. Salah satu aspek yang dapat dilihat adalah melalui fasilitas perumahan yang telah disediakan, yaitu Sumber Utama Air Minum dan Fasilitas Pembuangan Air Besar.

Air yang bersih dan sehat merupakan salah satu faktor pendukung untuk menciptakan hidup yang sehat. Oleh karena itu, kualitas air minum yang tersedia biasanya menjadi perhatian utama bagi seseorang yang akan memilih tempat tinggal. Air ledeng/air kemasan merupakan sumber air minum yang mempunyai kualitas paling baik karena sebelum air tersebut didistribusikan kepada rumahtangga terlebih dahulu melalui proses penjernihan dan sterilisasi.

Berdasarkan hasil Susenas Kabupaten Samosir 2008 Rumahtangga yang menggunakan sumber utama air minum yang lebih banyak yaitu sumber air minum lainnya sebanyak 42,32 persen, mata air mencapai 30,72 persen, pompa/air sumur sebanyak 20,21 persen dan sumber utama air minum yang paling sedikit yaitu ledeng/air kemasan sebesar 6,75 persen, namun mengalami peningkatan bila dibandingkan pada tahun 2007 yang mencapai hanya 6,05 persen. (dapat dilihat di tabel 1.8).

Sementara itu di Kabupaten Samosir Fasilitas Pembuangan Air besar, persentase terbesar adalah Fasilitas Pembuangan Air besar lainnya sebanyak 57,55 persen, jenis Kakus dengan tangki Septik yaitu sebesar 35,34 persen, sungai/danau 6,48 persen dan fasilitas pembuangan air besar kolam/sawah sebesar 0,63 persen.

4.4. PEREKONOMIAN

Pembangunan ekonomi melalui pembangkitan sektor riil tetap menjadi prioritas utama arah kebijakan pemerintah daerah dalam rangka untuk memperluas kesempatan dan menciptakan lapangan kerja. Dengan demikian nilai tambah dari setiap sektor ekonomi dapat ditingkatkan.

Pada tahun 2008 angka Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Kabupaten Samosir sebesar 1 392,38 Milyar rupiah. Bilamana angka tersebut dikoreksi dengan pengaruh inflasi, PDRB konstan tahun 2000 pada tahun 2008 baru sebesar 953.85 Milyar rupiah.

Sementara itu untuk PDRB per kapita Kabupaten Samosir pada tahun 2008 atas dasar harga berlaku hanya bernilai 10,58 juta rupiah per tahun, dan 7,25 juta rupiah per tahun atas dasar harga konstan.

<http://samosirkab.bps.go.id>

BAB V

INDEKS

PEMBANGUNAN

MANUSIA

(IPM)

5.1. Komponen-komponen IPM

5.2. Status Pembangunan Manusia

5.3 Reduksi Shortfall

<http://samodiripb.pbs.go.id>

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

5.1. KOMPONEN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

5.1.1. Indeks Pengetahuan

Peningkatan kualitas sumber daya manusia diarahkan pada upaya pembangunan di bidang pendidikan. Semenjak awal tahun 90-an pemerintah Republik Indonesia telah mencanangkan Program Wajib Belajar 9 Tahun yang diharapkan meningkatkan partisipasi anak, khususnya anak usia sekolah, dalam pendidikan dasar. Hal ini sesuai dengan salah satu amanat yang diemban pemerintah sesuai dengan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga pemerintah pusat maupun pemerintah daerah termasuk Pemerintah Kabupaten Samosir berusaha semaksimal mungkin untuk mengemban amanat ini yang diaktualisasikan melalui Renstra Kabupaten Samosir dan kebijakan pembiayaan melalui APBN dan APBD.

Ukuran yang sangat mendasar dari indikator pendidikan, secara makro adalah kemampuan baca tulis (melek huruf) penduduk berusia 15 tahun ke atas, yaitu kemampuan untuk membaca dan menulis huruf latin dan lainnya. Pada tahun 2008 angka melek huruf di Kabupaten Samosir adalah 96,60 persen, lebih rendah jika dibandingkan dengan daerah kabupaten/kota di sekitarnya yaitu Toba Samosir sebesar 98,15 persen, Humbang Hasundutan sebesar 98,20 persen, Tapanuli Utara sebesar 98,55 persen, Simalungun 97,31 persen, Karo 98,59 persen, Dairi 97,81

persen, kecuali Pakpak Barat 96,50 persen, (table 5.1 menyajikan angka melek huruf Kabupaten Samosir dan Propinsi Sumatera Utara selama dua tahun terakhir.

Tabel .5.1 Tingkat Melek Huruf Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Samosir dan Sumatera Utara Tahun 2007 - 2008

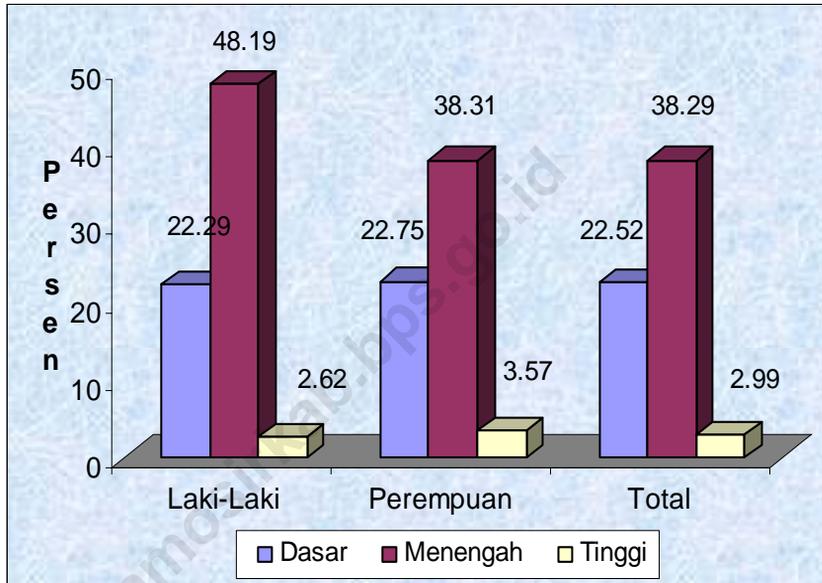
Wilayah	2007	2008
[1]	[2]	[3]
Samosir	96,60	96,60
Sumatera Utara	97,03	98,08

Sumber : **BPS Propinsi Sumatera Utara**

Tingkat melek huruf Kabupaten Samosir tahun 2008 tidak berubah dengan tahun sebelumnya pada tahun 2007 yaitu masing-masing dengan angka yang sama sebesar 96,60.

Indikator pendidikan lainnya yang merupakan kebalikan dari melek huruf adalah buta huruf. Tingkat buta huruf Kabupaten Samosir pada tahun 2008 sebesar 3,24 persen angka ini menurun bila dibandingkan tingkat buta huruf pada tahun 2007 yaitu sebesar 4,02 persen, namun lebih tinggi bila dibandingkan dengan Sumatera Utara yaitu 2,64 persen pada tahun 2008.

Gambar .6.
Presentase Penduduk usia 10 tahun ke atas
menurut pendidikan yang ditamatkan
Tahun 2008



Sumber : Susenas 2008 BPS KABUPATEN SAMOSIR

Ukuran lain dari tingkat pendidikan yang menjadi indikator dari IPM adalah rata-rata lama sekolah. Secara umum indikator ini menunjukkan jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk dewasa. Pada tahun 2008, rata-rata lama sekolah penduduk dewasa (15 tahun ke atas) di Kabupaten Samosir sebesar 9,50 tahun, yang berarti secara umum penduduk di Kabupaten Samosir sudah menyelesaikan tingkat pendidikan sampai jenjang Sekolah Menengah Pertama bahkan sudah duduk di kelas satu SLTA. Kondisi ini lebih tinggi dari angka rata-

rata lama sekolah Sumatera Utara secara umum yang tercatat sebesar 8,60 tahun.

Untuk lebih memperjelas tingkat pendidikan yang ditamatkan, pada Gambar .6. disajikan penduduk Kabupaten Samosir menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan. Pada tahun 2008 penduduk Kabupaten Samosir tamat pendidikan Sekolah Dasar sebesar 22,52 persen, tamat pendidikan Sekolah Menengah sekitar 38,29 persen, tamat pendidikan tinggi (Perguruan Tinggi) sebesar 2,99 persen, tidak pernah sekolah 2,81 persen dan tidak tamat SD sebesar 28,39.

Selanjutnya berkaitan dengan penentuan IPM, pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa salah satu komponen pembentuk IPM adalah indeks pengetahuan. Indeks pengetahuan itu terdiri dari indeks melek huruf dan indeks rata-rata lama sekolah. Pada tahun 2008 dari hasil penghitungan indeks melek huruf di Kabupaten Samosir tercatat sebesar 96,60 yang berarti masih kurang sekitar 3,40 point lagi untuk mencapai kondisi ideal yaitu 100. Indeks rata-rata lama sekolahnya pada tahun yang sama adalah sebesar 63,33 yang berarti masih jauh dari kondisi ideal. Sehingga didapat besarnya nilai indeks pengetahuan yang merupakan rata-rata tertimbang indeks melek huruf dan indeks rata-rata lama sekolah adalah sebesar 85,51 dibutuhkan sekitar 14,49 point lagi untuk mencapai kondisi ideal dari indeks pengetahuan.

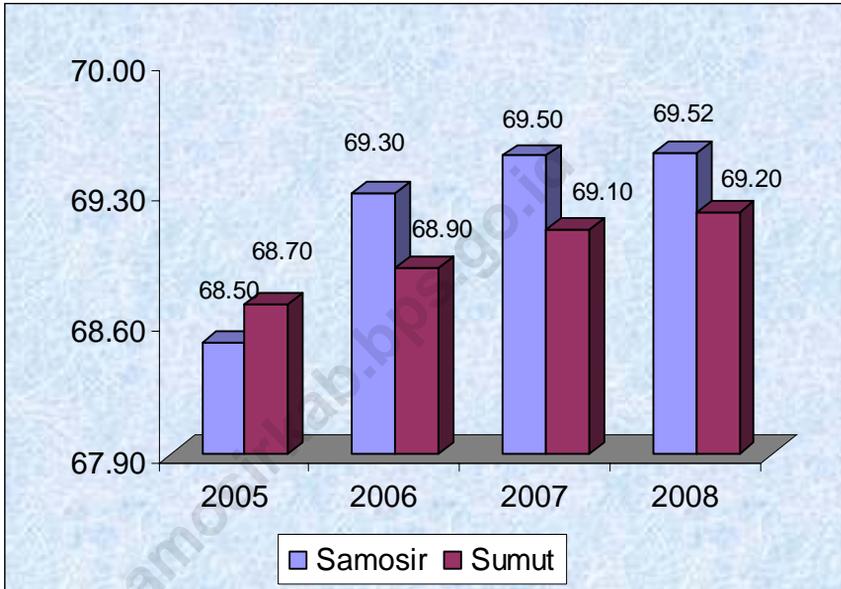
5.1.2. Indeks Kelangsungan Hidup

Kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan dapat dipandang dari aspek fisik dan non fisik yang tentunya keduanya saling

berkaitan. Kualitas fisik penduduk dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Salah satu indikator utama dalam mengukur derajat kesehatan penduduk secara makro adalah angka harapan hidup waktu lahir. Angka harapan hidup ini memperlihatkan keadaan dan sistem pelayanan kesehatan yang ada di masyarakat, karena dapat dipandang sebagai suatu bentuk akhir dari hasil upaya peningkatan taraf kesehatan secara makro. Kebijakan peningkatan kesehatan antara lain bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membiasakan diri untuk hidup sehat, diharapkan dapat meningkatkan angka harapan hidup penduduk. Semakin tinggi angka harapan hidup menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat secara makro semakin tinggi.

Angka harapan hidup di Kabupaten Samosir dari tahun ke tahun diharapkan semakin meningkat. Berdasarkan hasil Susenas pada tahun 2008 angka harapan hidup penduduk Kabupaten Samosir tercatat sekitar 69,52 tahun, sedikit meningkat dibanding pada tahun 2007 yang hanya sebesar 69,46 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan di Kabupaten Samosir juga mengalami peningkatan. Hal ini juga jika dibandingkan dengan angka Sumatera Utara. Secara umum dapat dikatakan bahwa kondisi kesehatan makro di Kabupaten Samosir sudah lebih baik, hal ini digambarkan oleh angka harapan hidup penduduk Samosir yang sudah lebih tinggi dari angka harapan hidup Sumatera Utara yang tercatat 69,20 tahun pada tahun 2008.

Gambar .7.
Angka Harapan Hidup Kabupaten Samosir
dan Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2005 – 2008



Sumber : BPS Propinsi Sumatera Utara

5.1.3. Indeks Daya Beli

Indeks daya beli digunakan untuk mengukur standar hidup layak. Indikator ini dipengaruhi pengetahuan yang dimiliki serta peluang yang ada untuk merealisasikan pengetahuan dalam berbagai bentuk barang/jasa sebagai pengeluaran. Sehingga dengan pendapatan yang ada manusia dapat menciptakan daya beli untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Dalam penghitungan indeks daya beli digunakan pendekatan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan dengan tingkat

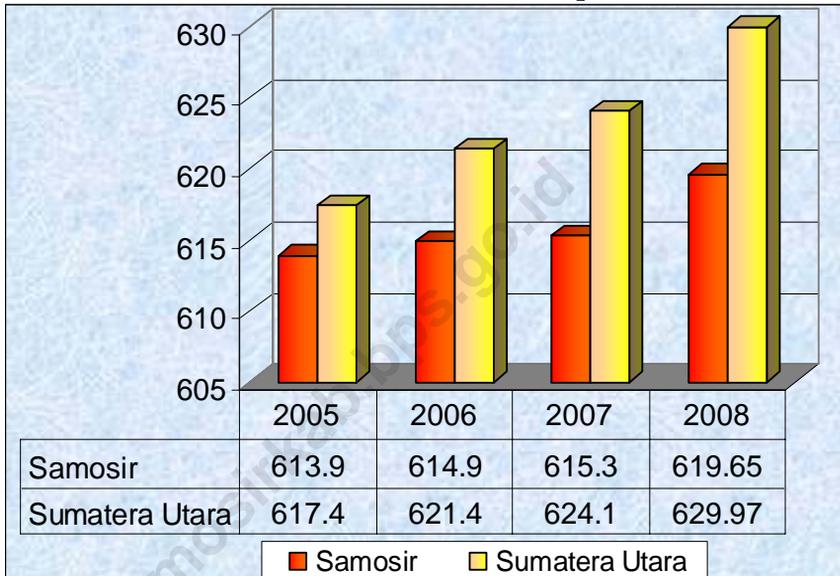
inflasi di daerah masing-masing. Penyesuaian ini diperlukan untuk menstandarkan tingkat harga yang berlaku di masing-masing daerah. Tingkat pengeluaran perkapita yang sama di suatu daerah belum tentu menunjukkan daya beli terhadap barang dan jasa yang sama karena tingkat harga di setiap daerah itu berbeda dan selera/pola konsumsi masyarakat berbeda, oleh sebab itu pengeluaran perkapita ini terlebih dahulu disesuaikan untuk dapat mengukur tingkat daya beli yang nyata.

Pada tahun 2008 daya beli penduduk Samosir sebesar Rp.619.650, mengalami kenaikan bila dibandingkan pada tahun 2007 yaitu sebesar Rp.615.350,- yang berarti sedikit lebih tinggi dibanding dengan daya beli penduduk di daerah tetangga yaitu Kabupaten Humbang Hasundutan pada tahun 2008 yaitu sebesar Rp. 609.620,-. Hal ini memperlihatkan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk di Samosir sedikit lebih tinggi dibanding Kabupaten Humbang Hasundutan.

Namun jika dibandingkan dengan Sumatera Utara secara umum, dapat dikatakan bahwa standar hidup penduduk Kabupaten Samosir masih lebih rendah, yang ditunjukkan pada gambar 8.

Selanjutnya jika dilihat berdasarkan indeks daya belinya, dari penghitungan diperoleh hasil bahwa indeks daya beli penduduk Kabupaten Samosir tahun 2008 adalah sebesar 68,74 yang berarti masih jauh dari kondisi ideal yaitu 100.

Gambar.8.
Tingkat Daya Beli Penduduk Kabupaten Samsir
dan Sumatera Utara
Tahun 2005 – 2008 (000.Rp.)



Sumber : BPS Propinsi Sumatera Utara

5.2. STATUS PEMBANGUNAN MANUSIA

Dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), UNDP membagi tingkatan status pembangunan manusia suatu negara atau wilayah kedalam empat golongan yaitu :

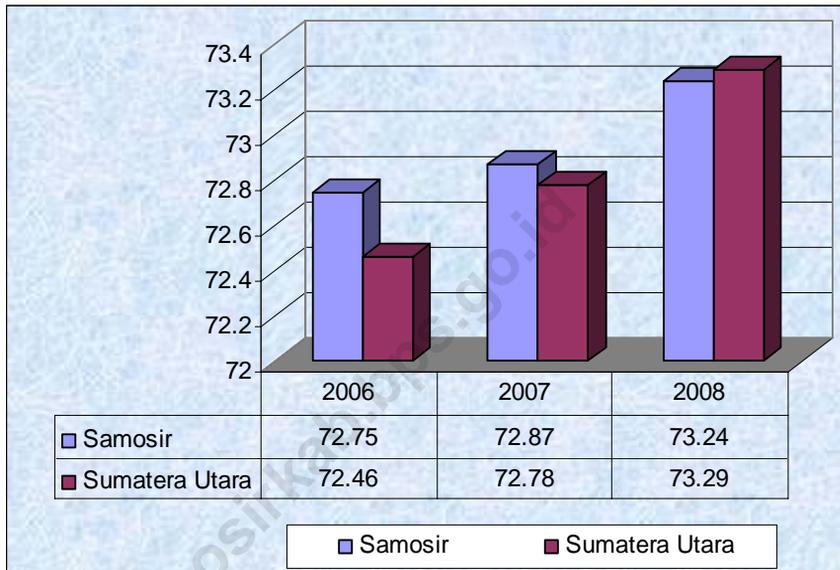
1. **Rendah** dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah kurang dari 50

2. **Menengah bawah** dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia berada diantara 50 sampai 66.
3. **Menengah atas** dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia berada diantara 66 sampai 80.
4. **Tinggi** dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah 80 keatas

Untuk melihat perkembangan IPM kabupaten/kota, tingkatan status Pembangunan Manusia ada 4 kriteria dimana status menengah dipecah menjadi dua, yaitu menengah bawah dan menengah atas. Jika status pembangunan manusia masih berada pada kriteria rendah hal ini berarti kinerja pembangunan manusia daerah tersebut masih memerlukan perhatian khusus untuk mengejar ketinggalannya. Begitu juga jika status pembangunan manusia masih berada pada kriteria menengah hal ini berarti pembangunan manusia masih perlu ditingkatkan. Jika daerah tersebut mempunyai status pembangunan manusia tinggi hal ini berarti kinerja pembangunan manusia daerah tersebut sudah baik/optimal maka perlu dipertahankan supaya kualitas manusia tersebut lebih produktif sehingga memiliki produktivitas yang tinggi. Berikut ini disajikan uraian tingkatan status dengan kriteria sebagai berikut :

Tingkatan Status	Kriteria
Rendah	$IPM < 50$
Menengah bawah	$50 \leq IPM < 66$
Menengah atas	$66 \leq IPM \leq 80$
Tinggi	$IPM > 80$

Gambar. 9.
IPM Kabupaten Samosir dan Sumatera Utara
Tahun 2006 – 2008



Sumber : **BPS Propinsi Sumatera Utara**

Pada gambar .9. terlihat bahwa dalam tiga tahun terakhir IPM Kabupaten Samosir mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2008 adalah sebesar 73,24, pada tahun 2007 sebesar 72,87 dan tahun 2006 sebesar 72,75 berada pada status menengah atas, kondisi ini meningkat dan diperlukan usaha yang lebih keras lagi untuk meningkatkan status pembangunan

manusia di Kabupaten Samosir menjadi berstatus tinggi. Adapun cara yang bisa ditempuh adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan, kualitas kesehatan dan juga kesempatan untuk memperoleh penghidupan yang layak.

Jika diperhatikan komponen komponen pembentuk IPM di Kabupaten Samsir, tampak bahwa kondisi pendidikan dan kesehatan sudah lebih baik dari Sumatera Utara secara umum. Namun daya beli masih rendah , kondisi pendidikan dan kesehatan ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan demikian juga daya beli diperlukan serius untuk meningkatkannya.

Tabel. 5.2 Status Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen IPM Kabupaten Samsir dan Sumatera Utara Tahun 2008

Komponen IPM	Samsir		Sumatera Utara	
	Nilai	Status	Nilai	Status
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Angka Harapan Hidup	69,52		69,20	
Angka Melek Huruf	96,60		97,08	
Rata-rata Lama sekolah (tahun)	9,50		8,60	
Daya Beli	619,65		629,97	
IPM	73,24	Menengah Atas	73,29	Menengah Atas

Sumber : BPS Propinsi Sumatera Utara

5.3 REDUKSI SHORTFALL

Sebagai ukuran kemajuan pembangunan manusia di suatu negara atau wilayah, Indek Pembangunan Manusia (IPM), biasanya digunakan untuk mengkaji kemajuan pembangunan manusia dalam dua aspek.

Aspek pertama perbandingan wilayah relatif terhadap wilayah yang lain berdasarkan besaran IPM yang dihitung berdasarkan komponen-komponen IPM , yang disusun dalam suatu peringkat kemajuan pembangunan manusia di berbagai wilayah dalam kawasan yang sama. Aspek yang lain adalah mengkaji kemajuan dari pencapaian setelah berbagai program diimplementasikan dalam suatu periode. Dalam hal ini, kemajuan dari pencapaian pembangunan manusia dikaitkan terhadap sasaran pencapaian ideal dari IPM yaitu = 100, serta IPM pada awal dan akhir periode. Pengukuran tingkat kemajuan pencapaian terhadap sasaran ideal IPM yang dihitung tiap tahun dan disebut *reduksi shortfall per tahun*, adalah merupakan gambaran yang terbanding dari kemajuan pencapaian atau kinerja pembangunan manusia di suatu kabupaten/kota. Semakin besar reduksi shortfall di suatu wilayah maka semakin besar kemajuan yang dicapai dalam periode tersebut. Dengan demikian *reduksi shortfall* dapat menunjukkan wilayah-wilayah mana yang maju lebih cepat/pesat dibandingkan dengan wilayah lain.

Dalam merumuskan kebijakan pembangunan, perlu diperhatikan tingkat pencapaian setiap tahun. Karena itu kajian tentang pencapaian upaya pembangunan manusia perlu dilakukan dalam suatu periode

tertentu, yang memberi kesempatan untuk mengkaji dampak dari program bagi peningkatan kapasitas dasar penduduk. Tingkat pencapaian setiap tahun menuju status pembangunan manusia yang ideal (*reduction in shortfall*) yang telah dihasilkan pada suatu periode, merupakan validasi bagi kebijakan pembangunan yang telah diputuskan pada periode tersebut. Sebagai ukuran kemajuan pembangunan manusia, IPM biasa digunakan untuk mengkaji kemajuan pembangunan manusia di suatu wilayah (kabupaten/kota atau propinsi). Semakin besar *reduksi shortfall* di suatu wilayah tersebut, berarti semakin besar kemajuan yang dicapai dalam periode tersebut. Dengan demikian maka seberapa besar kemajuan pencapaian pembangunan manusia setiap tahun di Kabupaten Samosir dapat dilihat dengan ukuran ini, dan wilayah–wilayah mana yang maju lebih cepat/pesat dibandingkan dengan wilayah lain dapat ditentukan dengan besarnya *reduksi shortfall* dari masing-masing wilayah.

L
A
M
P
I
R
A
N

<http://samosirkab.bps.go.id>

Tabel 1.1
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan
Total Area, Population and Population Density By Sub Regency
2008

No	Kecamatan <i>Sub Regency</i>	Luas Wilayah <i>Total Area</i> (km ²)	Penduduk <i>Populations</i>	Kepadatan Penduduk <i>Population Density</i> jiwa/population per km ² .
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	Sianjur Mulamula	140,24	11,069	78,93
2.	Harian	560,45	6,818	12,17
3.	Sitotio	50,76	8,726	171,91
4.	Onan Runggu	60,89	12,688	208,38
5.	Nainggolan	87,86	13,267	151,00
6.	Palipi	129,55	18,846	145,57
7.	Ronggur Nihuta	94,87	9,941	104,79
8.	Pangururan	121,43	29,990	246,97
9.	Simanindo	198,20	19,860	100,20
Kabupaten Samosir		1.444,25	131,205	90,85

Sumber : BPS KABUPATEN SAMOSIR

Source

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk, Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan
Population, Sex and Sex Ratio By Sub Regency
2008

No	Kecamatan <i>Sub Regency</i>	Jenis Kelamin/ <i>Sex</i>		Jumlah <i>Total</i>	Rasio Jenis Kelamin <i>Sex Ratio</i>
		Laki- laki <i>Male</i>	Peremp- uan <i>Female</i>		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.	Sianjur Mulamula	5,471	5,598	11,069	97.73
2.	Harian	3,337	3,481	6,818	95.86
3.	Sitotio	4,297	4,429	8,726	97.02
4.	Onan Runggu	6,215	6,473	12,688	96.01
5.	Nainggolan	6,514	6,753	13,267	96.46
6.	Palipi	9,351	9,495	18,846	98.48
7.	Ronggur Nihuta	4,894	5,047	9,941	96.97
8.	Pangururan	14,760	15,230	29,990	96.91
9.	Simanindo	9,723	10,137	19,860	95.92
Kabupaten Samosir		64,562	66,643	131,205	96.88

Sumber : BPS KABUPATEN SAMOSIR

Source

Tabel 1.3
Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Percentage of Population By Age Group and Sex
2008

No	Kelompok Umur Age Group	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	0 – 4	8.28	7.90	8.08
2.	5 – 9	11.27	10.77	11.02
3.	10 – 14	11.99	10.97	11.47
4.	15 – 19	12.80	12.09	12.44
5.	20 - 24	10.62	9.27	9.94
6.	25 - 29	8.42	7.40	7.90
7.	30 – 34	6.17	5.56	5.86
8.	35 - 39	5.43	5.17	5.30
9.	40 – 44	4.96	5.16	5.06
10.	45 – 49	4.84	5.32	5.08
11.	50 – 54	4.15	5.10	4.63
12.	55 – 59	3.52	4.07	3.80
13.	60 – 64	2.49	3.45	2.98
14.	65 +	5.05	7.78	6.43
Kabupaten Samosir		100.00	100.00	100.00

Sumber : BPS KABUPATEN SAMOSIR
Source

Tabel 1.4
Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas,
Menurut Status Perkawinan dan jenis Kelamin
Percentage of Population Aged 10 years and Over
by Marital Status and Sex
2008

No	Status Perkawinan Menurut Kelompok Umur <i>Marital Status by Age Group</i>	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	Penduduk 10 Tahun Keatas			
1.	<i>Population Aged 10 Years and Over</i>	100.00	100.00	100.00
2.	- Belum Kawin / <i>Single</i>	49.17	35.48	42.17
3.	- Kawin / <i>Married</i>	47.87	47.02	47.43
4.	- Cerai Hidup / <i>Divorced</i>	0.49	1.41	0.96
5.	- Cerai Mati / <i>Widowed</i>	2.47	16.09	9.44

Sumber : Susenans 2008, BPS KABUPATEN SAMOSIR
Source

Tabel 1.5
Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Keatas
Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin
Percentage of Population Aged 10 Years and Over by Educational Attainment
and Sex
2008

No	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan <i>Educational Attainment</i>	Laki-laki Perempuan		Jumlah <i>Total</i>
		<i>Male</i>	<i>Female</i>	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	Tidak/Belum Pernah Sekolah <i>Not Yet/Never Attended School</i>	0,93	4,73	2,81
2.	Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan : <i>Educational Attainment</i>			
	- Tamat SD <i>Primary School</i>	22,29	22,75	22,52
	- Tamat SLTP <i>Junior High School</i>	22,40	18,05	21,76
	- Tamat SLTA <i>Senior High School</i>	22,79	20,26	16,53
	- Tamat Universitas <i>University</i>	2,62	3,37	2,99
3.	Tidak Bersekolah Lagi <i>Unfinished School</i>	27,97	30,84	28,39
Kabupaten Samosir		100.00	100.00	100.00

Sumber : Susenas 2008, BPS KABUPATEN SAMOSIR

Source

Tabel 1.6
Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Tempat Tinggal (m²)
Percentage of Household by Floor Area of Dwelling Unit (m²)
2008

No	Luas Lantai Tempat Tinggal (m ²) <i>Floor Area of Dwelling Unit (m²)</i>	Persentase <i>Percentage</i>
[1]	[2]	[3]
1.	< 20	1,42
2.	20 – 49	71,68
3.	50 – 59	5,22
4.	60 - 99	17,26
5.	100 – 149	3,32
6.	150 +	1,10
Kabupaten Samosir		100.00

Sumber : Susenas 2008, BPS KABUPATEN SAMOSIR

Source

Tabel 1.7
Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Terlulus dari Tempat Tinggal
Percentage of Household by Primary Floor Material of the Dwelling Unit
2006 - 2008

No.	Jenis Lantai <i>Primary Floor Material</i>	Persentase <i>Percentage</i>		
		2006	2007	2008
[1]	[2]	[3]	[3]	[3]
1.	Tanah <i>Dirt</i>	3,84	6,48	2,84
2.	Lainnya <i>Others</i>	96,16	93,52	97,16
Kabupaten Samosir		100.00	100.00	100.00

Sumber : Susenas 2006 - 2008, BPS KABUPATEN SAMOSIR

Source

Tabel 1.8
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Utama Air Minum
Percentage of Household by Main Source of Drinking Water
2007 - 2008

No.	Sumber Utama Air Minum <i>Main Source of Drinking Water</i>	Persentase <i>Percentage</i>	
		2007	2008
[1]	[2]	[3]	[4]
1.	Ledeng /Air Kemasan <i>Pipe Water/ Bottled Water</i>	6.05	6.75
2.	Pompa / Sumur <i>Pump/Well</i>	6.14	20,21
3.	Mata Air <i>Spring</i>	29.52	30,72
4.	Lainnya <i>Others</i>	58.27	42,32
Kabupaten Samosir		100.00	100.00

Sumber : Susenas 2007 - 2008, BPS KABUPATEN SAMOSIR
Source

Tabel 1.9
Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Pembuangan Air Besar
Percentage of Household by Sanitation Facility
2008

No.	Fasilitas Pembuangan Air Besar <i>Sanitation Facility</i>	Persentase <i>Percentage</i>
[1]	[2]	[3]
1.	Kakus dengan Tanki Septik <i>Toilet with Septic Tank</i>	35,34
2.	Kolam /Sawah/Ricefield	0,63
3.	Sungai/Danau/River/Lake	6,48
4.	Lainnya <i>Others</i>	57,55
Kabupaten Samosir		100.00

Sumber : Susenas 2008, BPS KABUPATEN SAMOSIR

Source

Tabel 2.1
Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara
Life Expectancy by Regency/City in Sumatera Utara Province
2005-2008

No	Kabupaten /Kota <i>Regency/City</i>	Angka Harapan Hidup/ <i>Life Expentancy</i>			
		2005	2006	2007	2008
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.	N i a s	68,7	68.70	68.98	69.15
2.	Mandailing Natal	63,0	63.30	63.43	63.46
3.	Tapanuli Selatan	66,6	66.90	66.93	66.99
4.	Tapanuli Tengah	67,0	67.30	67.58	67.71
5.	Tapanuli Utara	67,4	68.20	68.64	68.95
6.	Toba Samosir	69,8	70.40	70.52	70.54
7.	Labuhan Batu	66,8	67.60	68.16	68.66
8.	A s a h a n	68,0	68.40	68.59	68.69
9.	Simalungun	68,4	68.50	68.67	68.73
10.	D a i r i	66,8	67.40	67.70	67.90
11.	K a r o	71,7	71.80	71.85	71.99
12.	Deli Serdang	68,9	69.50	69.83	70.07
13.	Langkat	68,8	68.90	68.92	68.99
14.	Nias Selatan	67,9	68.40	68.85	69.20
15.	Humbang Hasundutan	66,8	67.50	67.64	67.69
16.	Pakpak Barat	66,3	66.50	66.81	67.05
17.	Samosir	68,5	69.30	69.46	69.52
18.	Serdang Bedagai	68,0	68.60	68.76	68.79
19.	Batu Bara	-	66.10	68.18	68.34
20.	Padang Lawas Utara	-	-	-	66.48
21.	Padang Lawas	-	-	-	66.90
22.	Labuhan Batu Selatan	-	-	-	69.28
23.	Labuhan Batu Utara	-	-	-	68.82
24.	Sibolga	69,2	70.00	70.09	70.11
25.	Tanjung Balai	68,6	68.90	69.35	69.66
26.	Pematang Siantar	71,4	71.50	71.72	71.83
27.	Tebing Tinggi	70,3	70.80	70.98	71.07
28.	M e d a n	70,7	71.10	71.36	71.50
29.	B i n j a i	70,5	71.30	71.47	71.54
30.	Padang Sidempuan	68,8	69.10	69.18	69.35
Sumatera Utara		68,7	68.90	69.10	69.20

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Utara

Source

Tabel 2.2
Angka Melek Huruf Menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara
Literacy Rate by Regency/City in Sumatera Utara Province
(Persen/percent)
2005 - 2008

No.	Kabupaten /Kota Regency/City	Melek Huruf/Literacy Rate			
		2005	2006	2007	2008
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.	N i a s	87,1	89.45	89.45	89.45
2.	Mandailing Natal	98,1	99.31	99.31	99.31
3.	Tapanuli Selatan	99,5	99.74	99.74	99.76
4.	Tapanuli Tengah	95,6	95.60	95.60	95.74
5.	Tapanuli Utara	98,6	98.55	98.55	98.55
6.	Toba Samosir	96,8	97.92	97.92	98.15
7.	Labuhan Batu	97,9	98.37	97.37	97.92
8.	A s a h a n	94,2	95.62	98.55	96.68
9.	Simalungun	96,2	96.20	97.31	97.31
10.	D a i r i	95,8	97.81	97.81	97.81
11.	K a r o	97,2	97.39	98.59	98.59
12.	Deli Serdang	97,2	97.42	97.93	98.18
13.	Langkat	96,8	96.81	96.81	96.81
14.	Nias Selatan	84,8	84.80	84.80	84.80
15.	Humbang Hasundutan	98,2	98.20	98.20	98.20
16.	Pakpak Barat	95,3	96.22	96.50	96.50
17.	Samosir	96,6	96.60	96.60	96.60
18.	Serdang Bedagai	96,4	96.40	97.39	97.39
19.	Batu Bara	-	95.20	95.20	95.20
20.	Padang Lawas Utara	-	-	-	99.01
21.	Padang Lawas	-	-	-	99.64
22.	Labuhan Batu Selatan	-	-	-	98.81
23.	Labuhan Batu Utara	-	-	-	98.15
24.	Sibolga	99,2	99.20	99.20	99.20
25.	Tanjung Balai	98,8	98.97	98.97	98.97
26.	Pematang Siantar	99,4	99.39	99.39	99.39
27.	Tebing Tinggi	98,5	98.53	98.53	98.53
28.	M e d a n	99,1	99.12	99.29	99.29
29..	B i n j a i	98,0	99.17	99.17	99.17
30.	Padang Sidempuan	99,6	99.60	99.60	99.60
Sumatera Utara		96,0	97.03	97.03	97.08

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Utara

Source

Tabel 2.3
Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara
Mean Years of Schooling by Regency/City in Sumatera Utara Province
2005 - 2008

No.	Kabupaten /Kota Regency/City	Rata-rata Lama Sekolah <i>Mean Years of Schooling</i>			
		2005	2006	2007	2008
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.	Nias	6,2	6.40	6.40	6.40
2.	Mandailing Natal	7,6	7.70	7.70	7.70
3.	Tapanuli Selatan	8,9	8.90	8.90	8.90
4.	Tapanuli Tengah	8,0	8.10	8.10	8.10
5.	Tapanuli Utara	8,8	8.80	8.80	8.80
6.	Toba Samosir	9,7	9.70	9.70	9.70
7.	Labuhan Batu	8,2	8.30	8.30	8.30
8.	Asahan	7,2	7.20	7.37	7.37
9.	Simalungun	8,6	8.60	8.60	8.60
10.	Dairi	8,2	8.20	8.20	8.33
11.	Karo	8,9	8.90	8.90	8.90
12.	Deli Serdang	8,8	8.80	9.02	9.09
13.	Langkat	8,7	8.70	8.70	8.70
14.	Nias Selatan	6,2	6.30	6.30	6.30
15.	Humbang Hasundutan	8,6	8.60	8.65	8.74
16.	Pakpak Barat	8,1	8.10	8.10	8.10
17.	Samosir	9,5	9.50	9.50	9.50
18.	Serdang Bedagai	8,6	8.60	8.60	8.60
19.	Batu Bara	-	7.20	7.20	7.24
20.	Padang Lawas Utara	-	-	-	7.72
21.	Padang Lawas	-	-	-	7.97
22.	Labuhan Batu Selatan	-	-	-	7.80
23.	Labuhan Batu Utara	-	-	-	9.61
24.	Sibolga	9,5	9.50	9.50	7.99
25.	Tanjung Balai	8,6	8.60	8.60	8.60
26.	Pematang Siantar	10,8	10.80	10.80	10.80
27.	Tebing Tinggi	9,7	9.80	9.80	9.80
28.	Medan	10,7	10.70	10.70	10.70
29.	Binjai	9,7	9.80	9.84	9.84
30.	Padang Sidempuan	9,7	9.80	9.80	9.80
Sumatera Utara		8,5	8.60	8.60	8.60

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Utara
Source

Tabel 2.4
Pengeluaran Riil Per Kapita Yang Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota di
Propinsi Sumatera Utara
The Real Cost Percapita by Regency/City in Sumatera Utara Province
2005 - 2008

No.	Kabupaten /Kota Regency/City	Pengeluaran Riil Per Kapita (Rp.000) The Real Cost Percapita			
		2005	2006	2007	2008
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.	N i a s	591,5	592.41	593.94	598.85
2.	Mandailing Natal	623,4	624.38	624.66	629.74
3.	Tapanuli Selatan	624,2	625.12	631.41	635.81
4.	Tapanuli Tengah	599,0	603.56	608.30	612.93
5.	Tapanuli Utara	620,5	621.53	623.94	628.68
6.	Toba Samosir	631,6	632.63	633.83	638.57
7.	Labuhan Batu	620,3	624.25	626.80	631.57
8.	A s a h a n	618,4	619.37	620.00	624.23
9.	Simalungun	612,3	616.34	618.08	622.20
10.	D a i r i	618,1	618.92	619.08	623.18
11.	K a r o	610,1	610.35	612.92	617.30
12.	Deli Serdang	618,6	623.65	624.90	629.69
13.	Langkat	607,1	609.01	612.75	617.56
14.	Nias Selatan	575,4	579.29	583.10	587.42
15.	Humbang Hasundutan	598,5	602.38	604.99	609.62
16.	Pakpak Barat	601,5	602.44	603.99	608.63
17.	Samosir	613,9	614.91	615.35	619.65
18.	Serdang Bedagai	613,3	613.57	618.04	622.90
19.	Batu Bara	-	618.80	620.56	624.64
20.	Padang Lawas Utara	-	-	-	631.11
21.	Padang Lawas	-	-	-	619.75
22.	Labuhan Batu Selatan	-	-	-	628.66
23.	Labuhan Batu Utara	-	-	-	630.79
24.	Sibolga	614,1	614.66	616.94	621.67
25.	Tanjung Balai	606,8	608.62	616.97	620.68
26.	Pematang Siantar	619,3	620.00	625.90	630.64
27.	Tebing Tinggi	620,9	624.84	626.96	631.85
28.	M e d a n	619,7	620.72	625.86	631.05
29.	B i n j a i	622,0	623.24	624.44	628.70
30.	Padang Sidempuan	615,0	616.02	617.73	622.58
Sumatera Utara		618,0	621.39	624.12	629.97

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Utara

Source

Tabel 2.5
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kotadi Propinsi Sumatera Utara
Human Development Index (HDI) by Regency/City in Sumatera Utara Province
2005 - 2008

No.	Kabupaten /Kota Regency/City	IPM / HDI			
		2005	2006	2007	2008
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.	N i a s	66,1	66.80	67.07	67.55
2.	Mandailing Natal	68,8	69.42	69.51	99.92
3.	Tapanuli Selatan	72,2	72.46	72.96	73.33
4.	Tapanuli Tengah	68,9	69.51	70.01	70.48
5.	Tapanuli Utara	72,1	72.56	72.99	73.53
6.	Toba Samosir	74,5	75.17	75.33	75.75
7.	Labuhan Batu	71,1	72.03	72.54	73.08
8.	A s a h a n	70,1	70.67	71.16	71.57
9.	Simalungun	71,3	71.66	72.13	72.49
10.	D a i r i	70,5	71.31	71.49	72.01
11.	K a r o	73,5	73.52	74.01	74.43
12.	Deli Serdang	72,4	73.20	73.76	74.36
13.	Langkat	71,3	71.53	71.83	72.24
14.	Nias Selatan	63,9	64.51	65.06	65.59
15.	Humbang Hasundutan	69,8	70.48	70.79	71.24
16.	Pakpak Barat	68,7	69.11	69.47	69.95
17.	Samosir	72,2	72.75	72.87	73.24
18.	Serdang Bedagai	71,2	71.55	72.20	72.59
19.	Batu Bara	-	70.37	70.55	70.98
20.	Padang Lawas Utara	-	-	-	71.85
21.	Padang Lawas	-	-	-	71.15
22.	Labuhan Batu Selatan	-	-	-	73.16
23.	Labuhan Batu Utara	-	-	-	72.80
24.	Sibolga	73,2	73.70	73.93	74.39
25.	Tanjung Balai	71,6	71.90	72.80	73.26
26.	Pematang Siantar	75,8	79.95	76.52	76.95
27.	Tebing Tinggi	74,3	75.00	76.27	75.69
28.	M e d a n	75,4	75.65	76.22	76.70
29.	B i n j a i	74,4	75.30	75.51	75.88
30.	Padang Sidempuan	73,3	73.61	73.79	74.26
Sumatera Utara		72,0	72.46	72.78	73.29

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Utara

Source

Tabel 2.6
Peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Sumatera Utara secara Nasional dan propinsi Sumatera Utara
Nationally and Sumatera Utara Propincially Rate of Human Development Index (HDI) of by Regency/City in Sumatera Utara Province 2007-2008

No.	Kabupaten /Kota Regency/City	Nasional/ National		Prop. Sumut /Sumut Province	
		2007	2008	2007	2008
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.	Nias	368	383	25	29
2.	Mandailing Natal	245	261	23	28
3.	Tapanuli Selatan	99	107	11	11
4.	Tapanuli Tengah	223	236	22	26
5.	Tapanuli Utara	94	94	10	10
6.	Toba Samosir	41	44	5	4
7.	Labuhan Batu	116	117	14	15
8.	Asahan	184	188	19	22
9.	Simalungun	135	145	16	18
10.	Dairi	166	166	18	20
11.	Karo	71	75	6	6
12.	Deli Serdang	79	78	9	8
13.	Langkat	147	149	17	19
14.	Nias Selatan	415	433	26	30
15.	Humbang Hasundutan	192	200	20	23
16.	Pakpak Barat	246	259	24	27
17.	Samosir	102	112	12	13
18.	Serdang Bedagai	131	140	15	17
19.	Batu Bara	201	212	21	25
20.	Padang Lawas Utara	-	176	-	21
21.	Padang Lawas	-	204	-	24
22.	Labuhan Batu Selatan	-	115	-	14
23.	Labuhan Batu Utara	-	132	-	16
24.	Sibolga	72	77	7	7
25.	Tanjung Balai	105	111	13	12
26.	Pematang Siantar	21	22	1	1
27.	Tebing Tinggi	45	47	2	5
28.	Medan	26	26	3	2
29.	Binjai	37	41	4	3
30.	Padang Sidempuan	77	83	8	9
Sumatera Utara		8	8	8	8

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Utara

Source

Tabel 2.7
Reduksi Shortfall Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Sumatera Utara secara Nasional dan propinsi Sumatera Utara
Nationally and Sumatera Utara Provincially Shortfall Reduction of Human Development Index (HDI) by Regency/City in Sumatera Utara 2006-2008

No.	Kabupaten /Kota Regency/City	2006-2007	2007-2008
[1]	[2]	[3]	[3]
1.	N i a s	0.82	1.44
2.	Mandailing Natal	0.29	1.34
3.	Tapanuli Selatan	1.81	1.38
4.	Tapanuli Tengah	1.65	1.57
5.	Tapanuli Utara	1.58	1.98
6.	Toba Samosir	0.64	1.72
7.	Labuhan Batu	1.82	1.99
8.	A s a h a n	1.67	1.43
9.	Simalungun	1.67	1.27
10.	D a i r i	0.63	1.84
11.	K a r o	1.86	1.60
12.	Deli Serdang	2.09	2.31
13.	Langkat	1.04	1.46
14.	Nias Selatan	1.55	1.51
15.	Humbang Hasundutan	1.05	1.53
16.	Pakpak Barat	1.16	1.59
17.	Samosir	0.45	1.34
18.	Serdang Bedagai	2.29	1.42
19.	Batu Bara	0.61	1.46
20.	Padang Lawas Utara	-	-
21.	Padang Lawas	-	-
22.	Labuhan Batu Selatan	-	-
23.	Labuhan Batu Utara	-	-
24.	Sibolga	0.86	1.77
25.	Tanjung Balai	3.20	1.68
26.	Pematang Siantar	2.39	1.82
27.	Tebing Tinggi	1.06	1.72
28.	M e d a n	2.36	2.02
29.	B i n j a i	0.86	1.49
30.	Padang Sidempuan	0.69	1.77
Sumatera Utara		1.16	1.77

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Utara

Source

Publikasi ini menyajikan informasi mengenai Situasi Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Samosir pada Tahun 2008 ditinjau dari aspek Pendidikan, Kesehatan dan Perekonomian.

Cakupan Indikator meliputi :

- 1. Indeks Pengetahuan**
- 2. Indeks Kelangsungan Hidup**
- 3. Indeks Daya Beli**
- 4. Status Pembangunan Manusia**
- 5. Target Pencapaian**
- 6. Hubungan IPM dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi**

Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Samosir Tahun 2008 ini diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Samosir bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir.



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SAMOSIR

Jl. Raya Rianiate No.13 Desa Hutnamora - Pangururan
Telp./Fax. 0626 - 20597 e-mail : bps1217@bps.go.id
website : <http://sumut.bps.go.id/samosir>